GATRA PEDULI

RESPECT THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES



"States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public".

(Article 9, UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

BERSAMA LUHUT PASI BERLARI

PASAL KARET PERPRES EKSTREMISME

GATRA



LANGKAH MULUS MANTAN AJUDAN

PENCALONAN LISTYO SIGIT PRABOWO SEBAGAI KAPOLRI OLEH PRESIDEN JOKOWI BERLANGSUNG MULUS. JENDERAL TERMUDA INI PUNYA PEKERJAAN BERAT, DARI MENGATASI GESEKAN ANTARA POLRI DAN KELOMPOK ISLAM HINGGA MEMULIHKAN CITRA POLRI.

28 JAN-3 FEB 2021
9 770853 170601

GATRAcom

Jika Anda Butuhkan
Berita Terkini yang Akurat
dan Terpercaya
Go to www.GATRA.com

Baca GATRA, Baru Bicara



Unduh Aplikasi GATRA
di Smartphone Anda

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

@Gatramediagroup
@gatracomID
@gatra_news

No. 14 Tahun XXVII 28 Januari - 3 Februari 2021



BPMI SETPRES/ KRIS

Laporan Utama 6

SUKSESI SENYAP TB-1

Kapolri baru membawa 16 program prioritas. Pengaktifan Pam Swakarasa dan perubahan peran polsek dan polres menuai kritik. Ada tantangan besar untuk menegakkan keadilan restoratif.

4 Teropong
22 Hukum
Sengkarut Emas Crazy Rich Surabayan
26 Politik
Bara Rivalitas Penyelenggara Pemilu
Internasional
30 Rekonsiliasi Damai di Teluk Persia
34 Biden Batalkan Kebijakan Trump
38 Tiongkok Kembali Lockdown Menjelang Imlek
42 Kesehatan
Kebiri Kimia bagi Predator Seksual Anak
46 Lingkungan
Petaka Usai Hutan Hilang
60 Milenial
Perlawanan Lewat Lirik Lagu

Kulit Muka:
DIOLAH DARI FOTO BPMI SETPRES/ LAILY RACHEV

Ekonomi



CATRA/ ARCHIVE ENDAH

Selamat Datang di Era Kripto

Pemerintah mulai menata perdagangan aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka melalui penerbitan beberapa regulasi. Meski demikian, kripto masih haram digunakan sebagai alat pembayaran.

Nasional



ANTARA FOTO/ MUHAMMAD ADIMAJA

Pasal Karet Penanggulangan Ekstremisme

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme dikhawatirkan memicu konflik horizontal.

Olahraga



CATRA/ JONGKI HANDIANTO

Menunggu Gebrakan LBP di Dunia Atletik

Luhut Binsar Pandjaitan resmi menjabat Ketum PB PASI periode 2021-2025. Dipilih secara aklamasi, menepikan sejumlah nama beken di panggung nasional. Bisakah PASI berjaya?

Apa&Siapa 65



INSTAGRAM/ MARCHELLAFP

MARCHELLA FP & Terjemahkan Rasa Menjadi Kata

Semua artikel ini bisa diakses melalui :
www.gatra.com

Pemerintah Gunakan Dana Wakaf Rp597 Miliar untuk Pembangunan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, ada sejumlah proyek pembangunan yang sebagian sumber dananya berasal dari wakaf. Per 20 Desember 2020, dana wakaf senilai Rp597 miliar telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan.

Kemudian, Sri menambahkan bahwa nilai wakaf tunai yang berhasil terkumpul di perbankan nasional mencapai Rp328 miliar per 20 Desember 2020. "Sampai 20 Desember 2020, total wakaf tunai terkumpul melalui dan dititipkan bank sebesar Rp328 miliar, sedangkan *project based* wakaf capai Rp597 miliar," ujarnya, Senin lalu.



Wakil Presiden Ma'ruf Amin

GATRA/EKA KORIANA KU

Sri menuturkan, pemerintah akan terus berupaya menggenjot instrumen pembiayaan berbasis syariah, termasuk wakaf. Namun, realisasi wakaf tunai saat ini masih jauh dari potensi yang ada. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, sedangkan yang berhasil tergarap baru sekitar Rp391 miliar.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, potensi wakaf mencapai ribuan triliun. Jokowi meminta pemanfataan wakaf diperluas dari sekadar tujuan ibadah. Wakaf dapat dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi.

"Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp188 triliun," ujarnya saat merilis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan meresmikan Brand Ekonomi Syariah, Senin lalu.

Adapun Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, GNWU menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. Hal tersebut dimulai dengan dua transformasi utama, yaitu terkait jenis wakaf dan pembenahan tata kelola wakaf.Pembenahan tata kelola ini akan diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah(KNEKS) dan BWI.

Sebagai awal pembenahan, Bank Syariah Mandiri akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan Mandiri Manajemen Investasi sebagai pengelola dana wakaf yang produknya dinamakan "Wakaf Uang Berkah Umat".

"Pembenahan pengelolaan wakaf uang yang lebih profesional dan modern diharapkan akan mendorong pengerahan secara serentak sumber daya ekonomi yang dapat digunakan mendorong investasi dan kegiatan ekonomi di masyarakat," ujar Wapres. ■

PUTRI KARTIKA UTAMI



DPR menginginkan agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah

GATRA/ARDI WIDIYANDAH

Draft RUU Pemilu Buka Peluang Pilkada 2022

Draf revisi Undang-Undang Pemilu sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 ini, di dalamnya mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yakni pada 2022 dan 2023. Merujuk Pasal 731 Ayat (2) dalam draf revisi tersebut, pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah. Salah satunya, Provinsi DKI Jakarta.

Perlu diketahui, ketentuan di UU sebelumnya (UU Nomor 7 Tahun 2017), pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota akan digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden. Dalam drafRUU ini, selain pengaturan soal pilkada serentak 2022 dan 2023, juga dijelaskan bahwa pilkada pada 2027 akan disebut dengan pemilu daerah. Seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah pada tahun yang sama.

Bagi kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya sebelum 2027, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengangkat penjabat kepala daerah dengan masa jabatan hingga 2027. Lalu diganti dengan kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2027. Hal ini diatur dalam Pasal 735 draf revisi UU Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, mengeklaim bahwa hampir seluruh fraksi di DPR menginginkan agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah. Saan menuturkan, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan mengapa kemudian pilkada 2022 dan 2023 tidak dibuat serentak pada 2024. Salah satunya, terkait persoalan pengamanan yang tidak memadai hingga pertimbangan dari sisi kualitas elektoral. Belum lagi jika berkaca pada pemilu 2019 yang memakan banyak korban jiwa dari sisi petugas.

"Itu salah satu beban, *tapi* paling penting nanti kualitas elektoral berkurang. Kenapa? Karena orang sudah enggak fokus lagi. Kemarin saja kualitas elektoral untuk legislatif berkurang karena orang fokus terhadap pilpres," kata Saan kepada wartawan di kompleks DPR, Jakarta, Selasa pekan ini. ■

HIDAYAT ADHININGRAT P.

SUKSESI SENYAP TB-1

LANGKAH PENCALONAN LISTYO SIGIT PRABOWO SEBAGAI KAPOLRI OLEH PRESIDEN JOKOWI BERLANGSUNG MULUS. SEBAGAI JENDERAL TERMUDA, LISTYO SIGIT MEMPUNYAI BANYAK PEKERJAAN RUMAH. MULAI DARI MENGATASI GESEKAN ANTARA POLRI DAN KELOMPOK ISLAM HINGGA MEMULIHKAN CITRA KEPOLISIAN DI MASYARAKAT.



BPMI SETPRESKRIS

Presiden Joko Widodo menyerahkan tongkat jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Listyo Sigit Prabowo yang dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta

Rabu Pon menjadi hari bersejarah bagi Listyo Sigit Prabowo. Di usia 51 tahun, ia resmi menyandang pangkat jenderal. Kepangkatan dikukuhkan setelah mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri (Kabareskrim) itu dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu pekan ini.

Dalam sumpahnya, Listyo Sigit berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan dan rasa tanggung jawab. "Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata," ucapnya saat mengikuti sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi.

Pengangkatan Listyo Sigit menjadi Kapolri tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Polri Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kapolri. Ia menggantikan posisi Idham Aziz yang pensiun Februari mendatang. Sebelumnya, pada 13 Januari lalu, Jokowi mengirim nama Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR lewat Surat Presiden (Surpres) bernomor: R-02/Pres/01/2021.

Sepekan setelahnya, DPR melalui Komisi III menggelar uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap Listyo Sigit. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Herman Herry, DPR menyetujui usulan Jokowi mengenai calon Kapolri. Keputusan itu diambil setelah dilakukan uji kelayakan serta mendengar pendapat akhir semua fraksi DPR.

Pada saat *fit and proper test*, Listyo Sigit menyajikan makalah berjudul "Transformasi Menuju Polri yang Presisi". Makalah itu disiapkannya bersama Irjen Polisi Wahyu Widada selaku Ketua Tim Naskah Calon Kapolri. Wahyu merupakan teman seangkatan Listyo, lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1991, yang kini menjabat Kapolda Aceh.

Di hadapan DPR, Listyo Sigit berjanji akan melakukan pendekatan lunak dalam penanganan sejumlah konflik di Indonesia. "Pendekatan tidak dengan kekerasan, tetapi *soft approach*," kata Listyo Sigit.

Ia juga menegaskan, supremasi hukum yang berkeadilan bagi semua kalangan. "Tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas," tegasnya.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, mengatakan dengan pengalaman sebagai Kapolda Banten, Listyo diharapkan mampu meredam tekanan yang besar di awal masa jabatannya. Mantan Kabareskrim itu punya pengalaman teruji saat mendekati ulama Banten saat aksi demonstrasi pada 4 November 2016 di Jakarta atau yang dikenal sebagai Aksi 411.

"Nilai lebih dari dia [Listyo Sigit], bagaimana Banten yang ulama-ulamanya konservatif dan juga dianggap pemasok dari pendukung kalangan ekstrem, mampu didekati dengan cara-cara baik," kata Firman ketika diwawancara GATRA, Ahad lalu.

Pendekatan lunak yang dilakukan Listyo Sigit terbilang jitu dalam menghadapi situasi negara yang agak berjarak dengan kelompok Islam. "Pak Lis (Listyo Sigit) mendekati kalangan Islam dengan lebih elegan," Firman menerangkan.

Firman mengatakan, Islam dan non-Islam tidak menjadi dikotomi dalam penunjukan Kapolri kali ini. Dia kurang sependapat dengan adanya anggapan bahwa terpilihnya Listyo Sigit akan serta merta "garang" terhadap kelompok Islam. "Saya kira, alasan agama menjadi tidak tepat. Karena kenyataannya, Kapolri yang Islam sekalipun juga sangat menekan [kelompok] ekstrim," ulas Firman.

Listyo Sigit, ungkap Firman merupakan Kapolri kedua berlatar belakang Kristen, setelah almarhum Widodo Budidarmo, yang menjabat sebagai Kapolri pada 1974 hingga 1978. Di era yang sama, dua orang jenderal nasrani juga memimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yakni Maraden Panggabean dan Benny Moerdani.

Di sisi lain, Firman menambahkan, tidak cukup alasan bagi banyak pihak resisten terhadap Listyo Sigit hanya karena faktor agama. Toh, ia sudah mendapat penerimaan dari parlemen tak terkecuali dari parpol-parpol Islam. "Partai-partai Islam merespon positif. Dalam artian bukan hanya partai pemerintah. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) juga tidak terlalu kritis terhadap terpilihnya dia. Mungkin mencoba untuk melihat secara lebih objektif," dia menerangkan.

***

Beberapa kalangan menilai, loyalitas dan kedekatan tampaknya menjadi faktor kunci terpilihnya Listyo Sigit menjadi Kapolri. Maklum, ia pernah menjadi Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Surakarta, Jawa Tengah, pada 2011-2012, pada saat itu Jokowi menjabat Wali Kota Solo periode kedua. Listyo Sigit dan Jokowi punya memori saat kasus teror bom mengguncang Solo pada September 2011, persis di halaman Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo.

Tiga hari kemudian, Solo menjadi tuan rumah Asian Parliamentary Assembly atau Majelis Parlemen Tingkat Asia. Insiden itu membuat sesak Jokowi yang kala itu gencar mempromosikan Solo sebagai destinasi wisata. Selaku Kapolrestas, Listyo Sigit berhasil memulihkan situasi sehingga mengembalikan kepercayaan wisatawan bahwa Solo aman dari ancaman teroris.

Pada 2014, Listyo Sigit yang masih

berpangkat Komisaris Besar (Kombes) kembali masuk lingkaran dalam Jokowi ketika *ditunjuk menjadi ajudannya. Jokowi*, yang kala itu menjabat sebagai Presiden, *mulai menanamkan kepercayaan* kepada Listyo Sigit. Tak lama berselang, Listyo Sigit *dipromosikan menjadi* Kapolda Banten, dan naik pangkat dengan menyandang pangkat *jenderal* bintang satu.

Ketika menjabat sebagai Kapolda Banten pada akhir 2016, Listyo Sigit punya riwayat apik merangkul ulama Banten dan mempertemukannya langsung dengan Presiden Jokowi. Upaya itu ia lakukan saat meluasnya aksi demonstrasi dan sentimen kelompok Islam terhadap kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kedekatan Listyo dengan Jokowi menjadi bobot tersendiri. Namun tak semata kedekatannya, Listyo Sigit, menurut Mahfud, memiliki prestasi yang mampu mengubah Institusi Polri menjadi lebih baik.

"Dekat dengan presiden. Kariernya bagus, *track record*-nya juga bersih. Itu kelebihannya," ujar Mahfud ketika dihubungi GATRA lewat sambungan telepon, Ahad lalu. Sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud meyakini energi muda Listyo Sigit akan menjadi penggerak di tubuh kepolisian.

Mahfud membantah penunjukan Listyo akan menganggu internal Polri. "Listyo tidak punya musuh. Dia dekat dengan semua angkatan di Polri sehingga akan lebih mudah buat dia untuk menyosialisasikan dan menginternalisasikan program-programnya. Muda dan tidak resisten," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Lebih jauh, Mahfud membeberkan bahwa Kompolnas bekerja ekstra menjaring

"Kalau dari kualitas kelima calon, saya kira punya nilai 90. Sisanya terserah Presiden, dan dia (Jokowi) memilih Listyo."

Mahfud MD

nama kandidat calon Kapolri. Ia merinci terdapat 13 kandidat yang diseleksi Kompolnas melalui *focus group discussion* (FGD) sepanjang November hingga Desember 2020. FGD yang berlangsung sebanyak lima kali itu melibatkan masyarakat sipil, akademisi, Polri, dan internal.

Hasilnya, Kompolnas merekomendasikan lima nama. Di antaranya Wakil Kapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Boy Rafli Amar, Kepala Bareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Arief Sulistyanto, serta Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Polisi Agus Andrianto.

Mahfud menyebut lima nama yang disigi Kompolnas memiliki skor hampir sama. Dari kesemua kandidat, Listyo Sigit merupakan jenderal termuda karena berasal dari Akpol 1991. "Kalau dari kualitas kelima calon, saya kira, punya nilai 90. Sisanya terserah Presiden, dan dia (Jokowi) memilih Listyo," Mahfud mengungkapkan.

Analis politik Firman Noor mengatakan, di era reformasi muncul tren bahwa Kapolri terpilih harus dekat dengan presiden. Hal itu terlihat dari selera presiden menunjuk Kapolri mulai era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri (Mega), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Jokowi.

"Sosok yang secara *chemistry* dekat dengan presiden. Sehingga prosesi pemilihannya itu tidak semata ditentukan oleh hitungan *rigid* dari sisi angkatan maupun kepangkatan," ujar Firman.

Kedekatan diakui Firman menjadi faktor determinan yang mengalahkan senioritas. Presiden memilih sosok terdekat lantaran lebih dipercaya. "Terpilihnya Tito (Tito Karnavian) atau yang sekarang [Listyo] menunjukkan ada kontinuitas dalam konteks perpolitikan antara kepala negara dan kepolisian," ujarnya..

Kedua, Firman menilai penunjukan Listyo Sigit adalah khasnya Jokowi. Sebagai kepala negara, kata Firman, Jokowi ingin menjaga keberagaman dan inklusivitas di dalam pemerintahannya.

"Dia ingin menunjukkan bahwa dalam pemerintahannya, memilih seseorang tidak semata karena agama," katanya.

Faktor ketiga, Listyo Sigit dipandang sebagai



Firman Noor

FIRMANNOOR.COM

figur yang tepat dalam mengatasi situasi kenegaraan saat ini. "Yang mampu mengombinasikan antara kekhasan kepolisian sebagai 'pemukul' atau alat pukul rezim. Tetapi juga mampu mendekati kalangan Islam atau yang punya potensi ekstrem menjadi lunak," ujar peraih gelar doktor dari University of Exeter, Inggris, itu.

Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal juga tidak sepakat dengan rumor keterpilihan Listyo Sgit bermodal kedekatan dengan Presiden Jokowi. "Enggak dong. [Terpilihnya] karena prestasi dan *track record* selama ini. Pak Sigit dari letnan dua sudah melewati jenjang karier yang luar biasa," ujar Iqbal ketika dihubungi GATRA, Selasa lalu.

Iqbal mengatakan, institusi Polri sangat solid dan kompak mendukung Listyo Sigit sebagai Kapolri baru. Termasuk dukungan penuh dari alumnus Akpol 1991. "Iya sangat mendukung penuh semuanya. Karena tidak semua angkatan di kepolisian itu bisa mendapat kesempatan amanah jadi Kapolri," kata Kapolda Nusa Tenggara Barat itu.

Sebagai sesama abiturien Akpol 1991, Iqbal mengenang atasannya itu sebagai sosok yang luwes bergaul. "Tapi kalem enggak banyak bicara," ujarnya sembari tertawa. Iqbal berharap Listyo Sigit mampu mengemban amanah dengan baik sesuai ekspektasi masyarakat. "Tidak mudah, tapi kami yakin dengan *track record* dan ketulusan Mas Sigit, kami yakin dapat membawa Polri semakin dicintai masyarakat," ucap Iqbal.

***

Langkah Listyo Sigit menjadi Tri Brata Satu (TB-1) berjalan bukan tanpa dinamika. Posisinya yang berada di angkatan yunior, serta berlatar belakang agama minoritas, sempat dinilai akan menjadi batu sandungan bagi Listyo Sigit. Menjelang uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Listyo Sigit gencar melakukan safari politik ke banyak tokoh.

Kurang dari sepekan setelah penerbitan Surpres oleh Jokowi. Listyo Sigit menemui sejumlah mantan Kapolri, dari Sutarman, Timur Pradopo, Badrodin Haiti, Roesman Hadi, hingga Roesdihardjo.

Tentang adanya silaturahmi itu diamini oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono. Argo mengatakan, kegiatan itu merupakan tradisi yang dilakukan oieh calon Kapolri sekaligus bentuk penghormatan ke pendahulu



JENDERAL POL. LISTYO SIGIT PRABOWO

- Kelahiran Ambon, 5 Mei 1969
- Lulusan AKPOL 1991
- Kabareskrim ketiga yang menjadi Kapolri setelah Bambang Hendarso Danuri dan Sutarman

JABATAN PENTING KEPOLISIAN

- Wakapolrestabes Semarang (2010)
- Kapolresta Surakarta (2011)
- Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2012)
- Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara (2013)
- Ajudan Presiden RI (2014-2016)
- Kapolda Banten (2016-2018)
- Kadiv Propam (2018)
- Kabareskrim Polri (2019-2021)

PRESTASI:

Sebagai Kapolresta Surakarta

Terlibat dalam penyidikan kasus Bom Solo 2011 yakni bom bunuh diri di Gereja Bethel Sepenuh Injil (GBIS) Kepunten, Solo, Jawa Tengah, pada 25 September 2011

Sebagai Kabareskrim

- Menangkap tersangka penyiram air keras penyidik KPK Novel Baswedan yang melibatkan dua anggota Pasukan Gegana Korps Brimob berinisial RM dan RB pada 27 Desember 2019
- Pengungkapan kasus buronan hak tagih (*cassie*) Bank Bali, Djoko Soegiarta Chandra. Listyo memimpin penangkapan Djoko Chandra di Malaysia pada 30 Juli 2020
- Pengusutan kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung pada 13 November 2020. Polri menetapkan 11 tersangka
- Penanganan kasus pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab oleh Bareskrim Polri, setelah Polda Jabar menetapkan Rizieq tersangka kasus kerumunan massa yang melanggar protokol Covid-19 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada 9 Januari 2021
- Penanganan kasus korupsi di Bareskrim yang tercatat merampungkan 485 perkara. Sepanjang 2020, Bareskrim Polri mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari Rp310 triliun
- Pengungkapan kasus narkoba yang massif. Sepanjang 2020, Bareskrim mengamankan barang bukti sebanyak 5,91 ton sabu, 50,59 ton ganja, dan 905.425 butir pil ekstasi. Tersangka kasus tindak pidana narkoba yang diproses hukum mencapai 53.176 orang
- Di bawah komando Listyo, tim Ditipidnarkoba Polri mengungkap pengedar 1,2 ton sabu jaringan Iran-Timur Tengah

TANTANGAN:

Pengungkapan kasus kematian 6 laskar FPI di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 atas penyelidikan Komnas HAM yang menemukan adanya tindakan *unlawful killing*

Sumber: Riset GATRA

yang dianggap berjasa terhadap institusi kepolisian. "Sebagai anak dan bapak, Pak Sigit meminta dukungan dan wejangan sekaligus silaturahmi kepada mantan Kapolri," kata Argo.

Tak itu saja, Pada Senin, 18 Januari lalu, Listyo Sigit bertandang ke kantor Partai Demokrat dan menemui Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selain AHY, pertemuan turut dihadiri Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman, Hinca Panjaitan, Didik Mukrianto, dan lainnya.

Dalam pertemuan itu, AHY menitipkan pesan agar Listyo Sigit dapat berdiri sebagai tampuk pimpinan Polri untuk semua golongan. "Saya menyampaikan pada Komjen Sigit agar Kapolri yang baru dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan kepentingan. Agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, *justice for all*," ungkapnya.

Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan kunjungan Listyo Sigit ke Partai Demokrat beberapa hari sebelum *fit and proper test* sebagai silaturahmi biasa. Ia membantah terjadi *deal-deal* khusus antara Listyo Sigit dan Demokrat, sebab Listyo Sigit juga mengunjungi partai lain dan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"LSP [Listyo Sigit] melakukan kunjungan dan silaturahmi ke tokoh masyarakat, tokoh agama, mantan Kapolri, dan partai politik termasuk Demokrat. Saya melihat ini langkah baik yang dilakukan untuk meminta masukan," ujarnya.

Sebelum mengunjungi Partai Bintang Mercy, di hari yang sama, Listyo Sigit bersama istrinya juga sempat bersilaturahmi ke rumah Tito Karnavian, mantan Kapolri yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri. Tito yang berpengalaman menjadi Kapolri memberikan beberapa wejangan kepada yuniornya itu.

Tito mengungkapkan, pesan silaturahmi keduanya lebih ke upaya membuat internal Polri tetap solid. "Ya, karena Pak Sigit sama dengan saya, banyak senior di atas. Tapi kiat-kiat seperti itu, saya kira, cukup Pak Sigit dan saya yang tahu," ujar Tito kepada awak media.

Usai safari itu, Listyo Sigit menjalani *fit and proper test* di DPR dengan mulus. Mulusnya langkah mantan ajudan Jokowi itu di DPR kerap dikaitkan dengan kompromi politik. Didik Mukrianto yang juga anggota Komisi III DPR mengatakan anggota parlemen sepakat dengan pencalonan Listyo Sigit dan nyaris tidak ada silang pendapat atau gejolak berarti.



DOK.PRIBADI/CHOLIL NAFIS.COM

K.H. Cholil Nafis

Didik membantah tentang adanya lobi-lobi khusus yang dijalankan Listyo Sigit di parlemen guna memuluskan pencalonannya. "Tidak ada *personal approach* atau lobi khusus ke anggota," ucapnya kepada Gatra.

Soal adanya lobi-lobi juga dibantah Ketua Kompolnas Mahfud MD. Mahfud menegaskan bahwa Kompolnas tidak pernah menerima lobi-lobi khusus dari Listyo Sigit terkait pengusulan nama calon Kapolri. Ia juga sangsi kalau terbangun narasi Listyo Sigit membangun "gerilya" ke DPR, mengingat tingginya penerimaan. "Lagi pula, presiden sendiri sudah cocok. Jadi tidak perlu gerilya lagi," Mahfud menerangkan.

***

Fenomena sektarianisme yang masih kental serta agenda hajatan politik pilkada DKI pada 2022 dan pilpres 2024 membuka peluang terangkatnya kembali politik identitas dan isu berbasis agama. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Cholil Nafis, berharap Listyo Sigit menjadi sosok penyeimbang yang mampu menjaga hubungan antara pemerintah dan umat Islam. "Selain tersambung silaturahmi, ada juga sebuah persambungan antar pemikiran," kata Cholil kepada Ucha Julistian Mone dari Gatra, Selasa lalu.

Kedekatan Listyo Sigit dengan ulama bukan hal baru. Saat menjabat sebagai Kapolda Banten, ia juga rajin bersilaturahmi dengan kiai pengasuh pesantren dan ulama di Banten. Termasuk sowan ke Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, K.H. Ma'ruf Amin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum MUI dan Rais Aam PBNU dan silaturahmi ke K.H. Abuya Muhtadi Dimyathi di Cidahu Banten.

"Silaturahmi yang dilakukan Pak Sigit [ke ulama] ini bisa menjadi cara mendekati rakyat. Karena bagi umat Islam, tokoh agama itu pewaris dari pembawa risalah, pewaris nabi, yang melanjutkan misi-misi kenabian," ucap Cholil.

Cholil menyebut penunjukan Listyo Sigit yang non-muslim di negara mayoritas muslim menunjukkan kesetaraan bahwa tidak ada diskriminasi dalam bernegara. "Harapan saya, beliau bisa membuktikan apa yang disampaikannya tentang nasionalisme, keislaman, dan keadilan di Polri. Ini pembuktian bahwa siapa pun yang menjabat di republik ini, tidak boleh ada diskriminasi," ujarnya.

Andhika Dinata, Sujud Dwi Pratisto, M. Almer Sidqi, dan M. Guruh Nuary



GATRA/EVA ADRIANA ALI

Petugas medis menyuntikkan vaksin COVID-19 ke dokter dan perawat di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, pada Kamis, 14 Januari 2021.

Vaksinasi Serempak Berjalan di Daerah

Selepas pelataran halaman Istana Negara, Jakarta, menjadi tempat vaksinasi COVID-19 pertama kali pada 13 Januari lalu, berbagai daerah yang telah menerima distribusi vaksin, langsung melaksanakan program untuk menghasilkan kekebalan kelompok atau *herd immunity* tersebut.

Jawa Tengah misalnya, sejak kedatangan distribusi dosis vaksin pada 4 Januari lalu, per tanggal 24 Januari 2021, provinsi tersebut sudah merampungkan vaksinasi hingga 54,6%. Sebagaimana dikutip dari *Gatra.com*, Kepala Dinkes Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan bahwa saat ini sudah 19.790 orang tenaga kesehatan (nakes) yang telah divaksinasi tahap pertama dari total 32.973 nakes.

Dengan progres tersebut, kata Yulianto, vaksinasi tahap pertama untuk 32.973 nakes ditarget rampung pada 25 Januari atau maksimal 28 Januari 2021. Setelah itu, akan dilanjutkan penyuntikan vaksin tahap kedua kepada nakes yang telah disuntik vaksin tahap pertama, yang dimulai pada 28 Januari mendatang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19, dr. Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa sudah ada sekitar 172.901 nakes yang mendaftar akses vaksinasi COVID-19 hingga Sabtu, 23 Januari lalu. Nakes yang telah terdaftar tersebut, tersebar di 92 kabupaten/kota.

"Jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi di 13.525 pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi, sampai dengan hari ini sudah tercatat 172.901 orang telah mengakses untuk mendapatkan vaksinasi di 92 kabupaten/kota," kata Nadia dalam keterangan pers secara virtual.

Nadia mengungkapkan, ada sekitar 27.000 nakes belum mendapat vaksinasi dari total 172.901 nakes. Mereka merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, sehingga tidak bisa segera diproses untuk vaksinasi.

"Dari data tersebut, dari angka 172.901 ada sekitar 27.000 tenaga kesehatan yang kemudian belum mendapatkan vaksinasi dikarenakan karena batal ataupun ditunda dengan sejumlah alasan, antara lain misal saat *screening*, tekanan darahnya lebih dari 140 per 90. Kemudian ada yang merupakan penyintas COVID-19, sedang menyusui, ataupun memiliki komorbid lainnya," tutur Nadia.

Nadia mengatakan, proses vaksinasi terhadap nakes di berbagai daerah terus berjalan. Pemerintah menargetkan setidaknya ada 1,47 juta tenaga kesehatan yang dapat divaksinasi hingga Februari mendatang. "Kami sampaikan juga proses vaksinasi ini akan terus berjalan kepada seluruh tenaga kesehatan dan diharapkan hingga Februari kami bisa mencapai target 1,47 [juta] tenaga kesehatan," ujarnya.



Vaksin Sinovac di Indonesia

- 7 Desember 2020 → **Tahap 1** — Sebanyak 1,2 juta dosis
- 31 Desember 2020 → **Tahap 2** — Sebanyak 1,8 juta dosis
- 12 Januari 2021 → **Tahap 3** — Sebanyak 15 juta bahan baku

Tahapan Vaksinasi di Indonesia

Tahap 1 | **Waktu:** Januari-April 2021
Sasaran : Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tahap 2 | **Waktu:** Januari-April 2021
Sasaran : Petugas pelayanan publik, yaitu TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tahap 3 | **Waktu:** April 2021-Maret 2022
Sasaran : Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

Tahap 4 | **Waktu:** April 2021-Maret 2022
Sasaran : Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Sumber: Satgas Penanganan COVID-19

ADV

BERHARAP POLRI LEBIH PRESISI

KAPOLRI BARU MEMBAWA 16 PROGRAM PRIORITAS. PENGAKTIFAN PAM SWAKARASA DAN PERUBAHAN PERAN POLSEK DAN POLRES MENUAI KRITIK. ADA TANTANGAN BESAR UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN RESTORATIF.

Nama Rasminah kembali disebut-sebut. Kasus pencurian tiga biji kakao oleh nenek berusia 55 tahun yang terjadi pada 2009 lalu itu memantik tudingan Polri sebagai institusi yang diskriminatif. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu pekan lalu, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan lantang berjanji, tidak akan ada lagi Rasminah yang harus dipenjara karena mencuri kakao.

"Tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas," katanya. Artinya, Listyo, yang jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, akan menjadikan keadilan restoratif sebagai arus utama dalam masa kepemimpinannya hingga 2027 nanti.

Yang diutarakan Listyo memang cukup progresif. Namun, hampir semua calon Kapolri berjanji tentang hal serupa. Pembenahan internal dan penekanan pada profesionalisme Polri selalu menjadi nada pembuka. Meski pada akhirnya, Polri masih menjadi institusi papan bawah dalam ragam sigi kepuasan masyarakat.



Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta

ANTARA FOTO / POOL / GALIH PRADIPTA

Perumpamaan Rasminah, sebagai cita-cita penegakan hukum yang restoratif itu, ternyata belum menjadi ujung dari semua program yang dijanjikan Listyo. Ada beberapa soal lain, seperti tilang elektronik, pemanfaatan informasi teknologi, aktivasi Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa, hingga perubahan fungsi kepolisian sektor (polsek) dan kepolisian resor (polres).

Tentang pengaktifan Pam Swakarsa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersuara minor. Menurut Ketua YLBHI, Asfinawati, kepolisian semestinya menjadi penjaga keamanan dan ketertiban yang tunggal. Dengan demikian, polisi sebenarnya sudah terlatih untuk menangani persoalan keamanan. "Tapi masih banyak kesalahan penanganan. Apalagi jika diserahkan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Asfin, pengaktifan Pam Swakarsa ini sangat bertalian dengan prioritas Kapolri. Dia menuding, di antara prioritas itu adalah kewenangan pengamanan perundang-undangan demi proyek strategis nasional. Tudingan Asfin dilandasi oleh beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah penggunaan Pam Swakarsa sebagai perpanjangan tangan Polri untuk membungkam suara kritis. "Ada potensi, jika masyarakat menolak perampasan tanah demi proyek nasional, maka akan berhadapan dengan Pam Swakarsa," katanya.

Dalam situasi politik hari ini, agak sulit untuk memimpikan reformasi Polri. Asfin menggambarkan, Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan skala besar. Sementara, tidak ada arahan yang tegas dari Presiden terkait reformasi Polri.

Asfin juga menggarisbawahi perubahan peran polsek. Dalam paparan Listyo, polsek dan polres akan dikuatkan *posisinya sebagai lini depan pelayanan* masyarakat. Sayangnya, polsek tidak akan lagi melakukan fungsi penyidikan. Bagi Asfin, hal ini justru makin menjauhkan masyarakat dari keadilan.

"Tidak mungkin kasus-kasus biasa ditangani polda. Pertanyaannya, siapa yang mau menangani masalah masyarakat yang, menurut polisi, mungkin tidak penting, tapi penting untuk masyarakat?" tanya Asfin.

Kritikan Asfin belum selesai. Menurutnya, banyak catatan bahwa kepolisian bertindak diskriminatif dalam penegakan hukum. Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti, tapi begitu menyangkut pencemaran nama baik seorang tokoh, Kepolisian sigap menangani. "Kami sendiri punya laporan diskriminasi penegakan hukum. Misalnya untuk kasus peretasan," ia mengungkapkan.

Kritikan lain juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menilai bahwa sebagai mantan Kepala Divisi Propam Polri, Listyo seharusnya bisa melihat ragam persoalan di tubuh kepolisian. Baik dalam hal kebijakan yang dikeluarkan maupun tindakan aparat kepolisian. "Dari pengalaman ini, penting bagi Listyo untuk melakukan pembenahan mengenai mekanisme pengawasan internal kepolisian," katanya, Senin lalu.

Sebagai mantan ajudan Presiden Joko Widodo, Listyo bisa memanfaatkan kedekatannya untuk menyampaikan situasi terkini. Sehingga, presiden bisa mendengar dan mengetahui masalah yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan reformasi sektor keamanan.

Namun di sisi lain, Fatia mewantiwanti, jangan sampai kedekatannya dengan Presiden tercampur konflik kepentingan. Terlebih dalam proses penegakan hukum. "Terlepas periode yang akan dicapai, kita juga harus dengan ketat *mengawasi kinerja dari Listyo," ujarnya.*

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Fatia mengkritik pengaktifan Pam Swakarsa. Menurutnya, Pam Swakarsa merupakan kelompok sipil yang dipersenjatai. Kelompok yang dibentuk pada 1998 ini mulanya dibentuk untuk mengamankan sidang istimewa MPR RI. Namun kerap terlibat bentrok dengan kelompok masyarakat lainnya. "Pam Swakarsa itu sendiri saja sudah menjadi satu persoalan dan isu HAM hanya akan menjadi formalitas," ucapnya.

Masa jabatan Listyo sebagai Kapolri yang bisa panjang, menurut Fatia, juga perlu diukur secara objektif. Indikatornya, apakah Listyo akan membawa Polri menjadi sebuah institusi yang lebih baik atau tetap berjalan di tempat.

Jika tidak terjadi perubahan yang lebih baik selama masa jabatan Listyo, Presiden Jokowi bisa dinilai tidak tegas. Karena, pemilihan Kapolri berdasarkan hak prerogatif Presiden. "Namun bukan berarti polisi menjadi pelindung pemerintah. Polisi adalah pelindung negara," ia menegaskan.

***

Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Listyo membawa konsep Polri Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Ini kemudian disingkat menjadi Presisi. Menurut Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, apa yang diusung Listyo sudah cukup progresif.

Dalam konsepnya, Listyo ingin membawa beberapa perubahan, salah satunya adalah menggunakan teknologi informasi. "Artinya, Polri ke depan akan lebih modern. Hal ini sesuai dengan *grand strategy* Polri 2005-2025," ujarnya.

Menurut Poengky, Listyo juga menekankan pentingnya Reformasi Kultural Polri. Hal ini agar Polri menjadi lebih humanis dan menghormati hak asasi manusia. Polri juga *akan memberikan perhatian terhadap isu* perempuan dan anak-anak.

Hal ini termasuk di internal Polri



FOTO ANTARA / RAHMAD

Polisi membagikan masker kepada pelajar SMP agar membantu meningkatkan kesadaran pelajar dalam mematuhi protokol kesehatan dalam belajar tatap muka guna menghindari penularan Covid-19

sendiri dengan meningkatkan peran polwan untuk duduk di posisi-posisi strategis. Sebenarnya, Listyo sudah mengirimkan sinyal ini. Terlihat dari seorang polwan bintang satu yang ikut mendampingi Listyo di DPR, Brigjen Ida Utari.

Di sisi lain, untuk dapat mewujudkan Polri yang Presisi, perlu bacaan dan analisis keamanan dalam negeri yang tepat. Karena itulah, menurut Poengky, ada beberapa peran yang harus ditingkatkan, di antaranya peran intelijen keamanan dan bidang pembinaan masyarakat (bimnas).

Peran dua satuan ini untuk dapat membaca situasi dan kondisi keamanan dalam negeri hingga bagian terkecilnya di masyarakat. "Peningkatan profesionalitas SDM Polri harus dikuatkan. Terlebih di daerah-daerah perbatasan, daerah terpencil dan tertinggal, agar masyarakat semuanya dapat merasakan pelayanan Polri," dia menambahkan.

Poengky menegaskan, pihaknya mendukung upaya menjadikan polres dan polsek sebagai ujung tombak pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas)dan mengutamakan *restorative justice*. Hal ini memang pernah diusulkan sebelumnya oleh Kompolnas pada 2017 lalu. Jika didasarkan melalui konstitusi, menjaga harkamtibmas melalui pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat lebih diutamakan. Setelah itu, penegakan hukum sebagai jalan terakhir.

Menurutnya, polsek adalah wajah terdekat Polri di masyarakat. Sehingga akan lebih baik jika pendekatan ke masyarakat adalah pendekatan yang humanis melalui harkamtibmas. Jika menangani penegakan hukum di polsek, kata dia, Polri justru lebih terlihat berwajah galak. "Tetapi kebijakan ini perlu *pilot project* untuk melihat efektivitasnya," katanya.

Poengky mengusulkan, perlu uji coba beberapa daerah dengan tingkat pengaduan penegakan hukum yang rendah. Untuk polsek yang fokus di harkamtibmas, penegakan hukumnya akan dialihkan ke polres. "Perlu dilihat juga bahwa kejaksaan negeri dan pengadilan negeri levelnya di tingkat kabupaten/kota, sehingga lebih cocok jika Polres yang menangani penegakan hukum daripada polsek," ujarnya.

Sementara itu, untuk Pam Swakarsa, Poengky meminta masyarakat untuk tidak salah tafsir. Menurutnya, Pam Swakarsa yang akan ditingkatkan peranannya oleh Listyo adalah pengamanan swakarsa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Jadi, menurut Poengky, bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, meliputi lingkungan permukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. "Jadi pengamanan swakarsa praktiknya seperti satpam, *security*, atau Siskamling begitu," dia menerangkan.

Tentang masa jabatan Listyo sebagai Kapolri yang bisa melewati beberapa perhelatan politik juga akan menimbulkan kekhawatiran soal netralitas Polri. Tapi Poengky menyatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebih. Sebab, Tito Karnavian juga menjalani jabatan Kapolri cukup lama. Dan melewati beberapa kontestasi politik. "Toh, Polri dapat membuktikan netralitasnya,dan dapat mengawal demokrasi di Indonesia dengan baik," dia menjelaskan.

Sementara itu, peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto, mengatakan, konsep yang disampaikan oleh Listyo harus dibarengi oleh implementasi. "Jangan sampai nanti jadinya ganti Kapolri, cuma ganti jargon," kata Bambang.

Konsep presisi yang dibawa Listyo sebenarnya bukan barang baru. Pengawasan masyarakat dan transparansi Polri, Bambang melanjutkan, sudah ada di beberapa konsep Kapolri-Kapolri sebelumnya. "Tapi implementasinya belum maksimal berjalan. Itu yang harus menjadi catatan," dia menambahkan.

Tentang Pam Swakarsa, Listyo harus patuh pada semangat pengembangannya. Menurut Bambang, Pam Swakarsa jangan sampai keluar dari acuan yang pernah dibuat oleh Mantan Kapolri Awaloedin Djamin, yang dikenal sebagai "Bapak Satpam Indonesia".

Konsep Awaloedin adalah mengentalkan partisipasi modern masyarakat sesuai dengan konsep Pam Swakarsa, yakni *security industry*. Menurut Bambang, pengembangan Pam Swakarsa nantinya bisa diarahkan pada konsep tersebut. "*Security industry* ini tidak membebani biaya negara. Karena dikelola oleh masing-masing swasta," Bambang menjelaskan. ■

ADITYA KIRANA, ERLINA FURY SANTIKA, WAHYU WACHID ANSORY, RYAN PUSPA BANGSA, DAN UCHA JULISTIAN MONE

PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI

1. Penataan kelembagaan.
2. Perubahan sistem dan metode organisasi.
3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0.
4. Perubahan teknologi kepolisian modern (police 4.0).
5. Peningkatan kinerja pemeliharaan kamtibmas.
6. Peningkatan kinerja penegakan hukum.
7. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19 (PC).
8. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
10. Penguatan penanganan konflik sosial.
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri.
12. Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi.
13. Pemantapan komunikasi publik.
14. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan.
15. Penguatan fungsi pengawasan.
16. Pengawasan oleh masyarakat (*public complaint*).

Sumber: Makalah Calon Kapolri untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan

MAHFUD MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Ketua Komisi Kepolisian Nasional

"TRACK RECORD-NYA BERSIH"

Presiden Jokowi baru saja melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 27 Januari 2021. Terpilihnya mantan Kabareskrim itu tidak bisa dilepaskan dari proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sebelumnya, Presiden Jokowi melibatkan Menkopolhukam sekaligus Ketua Kompolnas, Mahfud MD, sebagai Panitia Seleksi Kapolri Baru. Bersama dengan anggota Kompolnas lainnya, Mahfud berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno untuk menyerahkan usulan nama ke tangan Jokowi.

Guna menyimak proses seleksi yang dilakukan Kompolnas untuk mengerucutkan nama Kapolri, Wartawan GATRA, M. Almer Sidqi, berkesempatan mewawancarai Mahfud lewat sambungan telepon pada Minggu malam, 24 Januari 2021. Berikut petikannya:

Bagaimana Anda melihat sosok Listyo?

Baik (orangnya). Makanya, kami mengusulkan dia salah satu dari lima nama (Cakapolri). Kalau dari kualitas kelima calon, saya kira, punya nilai 90. Sisanya terserah presiden dan dia memilih Listyo.

Bagaimana cara kerja Kompolnas menyeleksi calon-calon tersebut?

Kami buat *forum group discussion* (FGD) dengan LSM, mantan-mantan Kapolri, dengan pejabat Polri aktif, dan akademisi. Sesudah itu, kami buat analisis dari tiap kandidat, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Kami analisis, lalu muncul lima nama itu yang disaring dari 13 nama. Mereka semua memenuhi syarat sangat baik untuk dipilih.

FGD-nya kapan?

Bulan November sampai Desember 2020. Lima kali. Tiga kali dengan masyarakat sipil dan akademisi, satu kali dengan keluarga besar Polri sendiri, dan satu kali internal. Dalam catatan saya, ada lima kali. Hampir tidak ada keberatan sama sekali kepada Listyo jika dibandingkan dengan keseluruhan kandidat.

Apa kelebihan Listyo ini?

Kelebihannya, dekat dengan Presiden. Kariernya juga bagus. *Track record*-nya juga bersih. Itu kelebihannya. Kalau berbicara mengenai kekurangan, itu relatif. Mungkin kekurangan bisa menjadi kelebihan. Misalnya, ada orang yang mengatakan kekurangan Listyo adalah dia masih terlalu muda. Maka, akan ada orang yang mengatakan bahwa kelebihan itu justru karena dia masih muda.

Anda menyebut ada faktor kedekatan Listyo dengan Presiden. Apakah itu menjadi faktor penting?



ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

Saya kira, penting. Listyo dengan Kompolnas juga berhubungan baik. Terutama dengan saya sebagai ketua. Orangnya profesional dan kerjanya terukur. Misalnya, waktu penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia. Dia melakukan operasi dan berhasil. Lalu bukan hanya Djoko Tjandra, teman-teman Listyo sendiri yang [jenderal] berbintang juga ikut diseret ke pengadilan. Itu satu prestasi yang mungkin, *dulu*, tidak terbayangkan ada.

Bagaimana Anda memandang gerilya Listyo berkunjung ke sana kemari?

Kalau dengan saya, dia tidak bergerilya. Saya kira, silaturahmi biasa. Kalau dengan orang lain, saya tidak tahu siapa yang digerilya, tetapi kalau dengan saya, tidak. Menurut saya, tidak ada gerilya yang dilakukan oleh Listyo. Lagi pula Presiden sendiri sudah cocok, jadi tidak perlu gerilya lagi.

Kalau di DPR, bagaimana?

Tidak ada. Dia datang ke DPR karena diundang, menyampaikan visi-misi. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada. Bahkan sampai menit-menit terakhir, saya tidak pernah dengar ada gerilya ke DPR. Saya yang justru dipanggil ke DPR untuk menjelaskan mengapa mengusulkan Listyo dan kriteria apa yang dinilai, dan kami menjelaskannya secara terbuka.

Apa pandangan Anda terhadap program yang ditawarkan Listyo?

Kalau memang bisa dilaksanakan secara konsisten, bagus. Listyo tidak punya musuh. Dia dekat dengan semua angkatan di Polri, sehingga akan lebih mudah buat dia untuk menyosialisasikan dan menginternalisasikan program-programnya. Dia muda dan tidak resistan.

Bagaimana Anda melihat komitmen Listyo dalam memberantas radikalisme agama, terorisme, dan narkoba?

Itu amanat undang-undang, dan mesti diemban semua pejabat Polri. Tidak hanya spesifik ke soal terorisme, misalnya, tetapi pada semua tugas-tugas kepolisian negara. Saya kira, dia orang yang tepat dan mampu untuk melakukan itu.

Angka kepercayaan masyarakat kepada Polri terus menurun. Apa yang perlu dibenahi Listyo?

Memperbaiki, tentu saja. Kita berharap, Listyo bisa memperbaiki itu semua, lebih transparan dan terbuka. Tetap terukur seperti selama ini. Kalau tudingan-tudingan, selalu muncul setiap periode. Setiap pemerintah itu selalu dituduh melanggar HAM.

Apa ada pemerintah yang tidak dituding melanggar HAM sejak *dulu*? Itu selalu ada. Tidak apa-apa. Bagus juga seperti itu. Sama dengan tudingan bahwa pemerintah saat ini mengobral tanah negara untuk cukong dan pengusaha. Memangnya hal semacam itu yang paling banyak di tahun berapa? ■

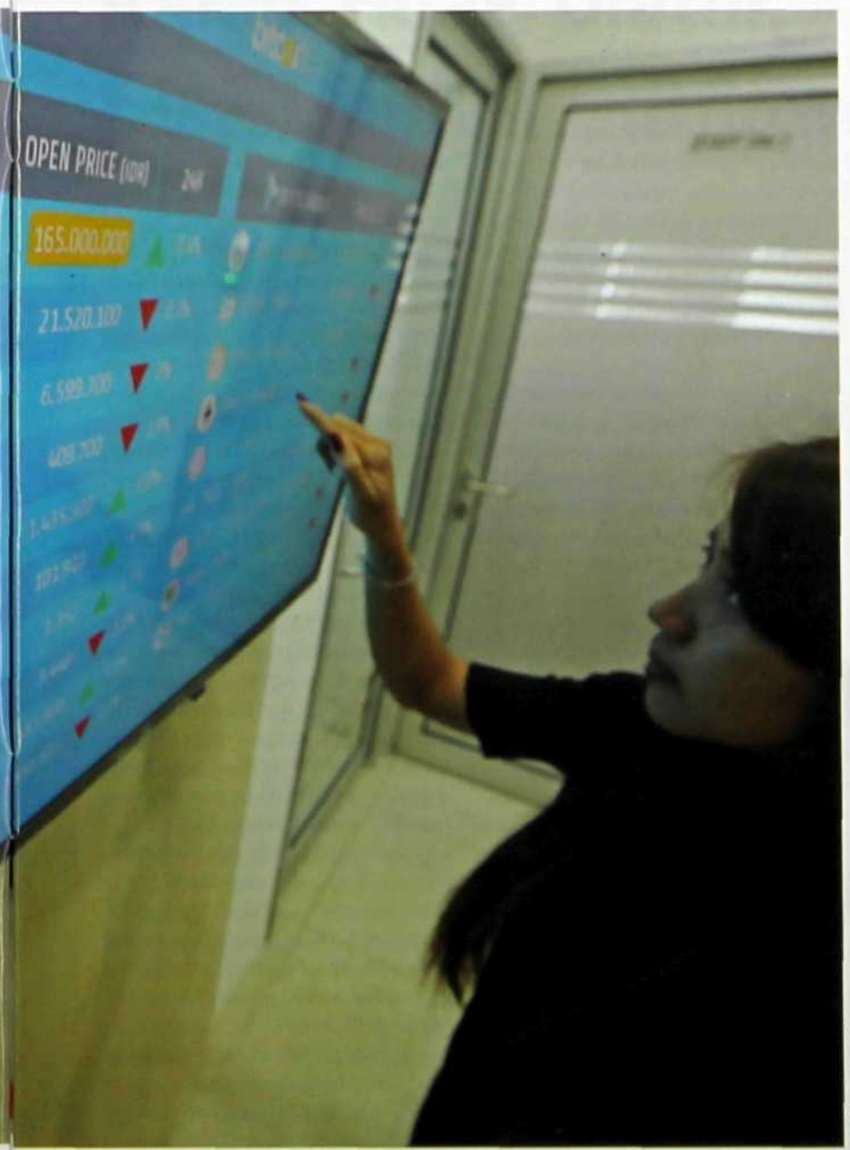
ASET KRIPTO

Selamat Datang di Era Kripto

Pemerintah mulai menata perdagangan aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka melalui penerbitan beberapa regulasi. Meski demikian, kripto masih haram digunakan sebagai alat pembayaran.



Trading cryptocurrency



GATRA/ ARDI WIDI YANSAH

Ibarat *roller coaster*, perdagangan *crypto asset* (aset kripto), sebutan yang disepakati pemerintah untuk mengganti istilah *cryptocurrency*, sangat fluktuatif. Terkadang dalam sepekan, harga satu jenis aset kripto bisa naik hingga 300%, lalu turun lagi 300%. Mirip perdagangan valuta asing atau *forex* (*foreign exchange*).

Namun berbeda dengan perdagangan di pasar saham, yang memiliki batas kenaikan dan penurunan harga. Kenaikan harga saham tidak bisa melebihi 20%-35% per hari, sedangkan batas penurunannya selama masa pandemi Covid-19 sebesar 7% per hari.

Tingginya volatilitas di perdagangan aset kripto ini menjadi keseruan tersendiri untuk Endy Daniyanto (37 tahun). Sejak 2017, Endy menjadi *trader* paruh waktu di bursa kripto. "Melihat harga kripto naik terus, jadinya tertariknya di situ," katanya kepada GATRA, Senin lalu.

Endy bercerita, dirinya pernah membeli aset kripto Sushiswap (SUSHI). Tak sampai dua bulan, harga SUSHI naik 350%. Artinya, jika posisi harga beli SUSHI Rp30.000 per koin, dalam waktu singkat harganya naik menjadi Rp105.000 per koin. Potensi keuntungannya mencapai Rp75.000 per koin.

Sering untung bukan berarti Endy tidak pernah *boncos*. Pegawai di salah satu badan usaha swasta ini pernah merugi Rp4 juta. Ketika itu, kripto ZClassic (ZCL) baru diluncurkan dan menawarkan *airdrop* Bitcoin Private (BTCP) secara gratis, sebagai promosi. Syaratnya, *trader* harus membeli ZCL. Endy pun membelinya senilai US$200.

Apes, setelah program *airdrop* selesai, harga kripto ZCL turun ke US$2 dolar. "Itu ruginya Rp4 jutaan. Untung tidak terlalu besar ruginya," kata Endy disertai tawa renyah.

Bagi Endy, perdagangan aset kripto tidak perlu diatur secara ketat oleh pemerintah. Mekanisme transaksinya berbasis teknologi *blockchain*, semacam catatan transaksi dengan pembukuan terbuka. "Aset kripto mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme *blockchain*. Mungkin supaya masyarakat lebih merasa aman, perlu didukung sama regulasi pemerintah," ujarnya.

***

Baru-baru ini, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Aturan ini tertuang di Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Aturan ini menetapkan selain 229 jenis kripto tadi yang dianggap ilegal. Beleid tersebut juga mengatur syarat kelayakan aset kripto yang bisa diperdagangkan hingga tahapan penyelesaian pada pelanggan, karena adanya jenis aset kripto yang dicabut

dari daftar bursa kripto.

Kepala Bappebti, Sidharta Utama, menjelaskan bahwa minat investasi masyarakat di perdagangan aset kripto terus meningkat. Maka itu, pemerintah perlu mengatur aset kripto lebih baik demi melindungi kepentingan masyarakat. "Dan juga memberi kepastian hukum kepada pedagang aset kripto," ujarnya kepada GATRA.

Akademisi Universitas Indonesia ini menyatakan, meskipun teknologi *blockchain* cukup mumpuni mengatur perdagangan aset kripto, pemerintah tetap perlu mengawasi. Hal ini karena tidak semua aset kripto transaksinya menggunakan teknologi *blockchain*. "Dan kita enggak tahu ke depan, ada teknologi lain selain *blockchain* dan itu memungkinkan. Maka itu, perlu ada *monitoring* melalui regulasi untuk menjamin keamanan," katanya.

Sidharta mengatakan, selama semester I 2021, Bappebti akan terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan perdagangan aset kripto di bursa berjangka. Dalam waktu dekat, Bappebti juga akan membentuk lembaga kustodian bursa berjangka, untuk mengecilkan risiko bagi investor. Berbeda dengan lembaga kliring bursa berjangka yang berasal dari Bappebti, lembaga kustodian berasal dari luar Bappebti alias pihak ketiga. "Syarat menjadi kustodian itu ketat," ujarnya.

Selama ini, kata Sidharta, semua aset kripto ditempatkan di pedagang. Peran lembaga kustodian nantinya akan menjadi tempat penyimpanan sebagian aset kripto yang dijaminkan ke asuransi, sehingga tidak semua ditempatkan di pedagang kripto. "Karena kalau dibawa kabur, aset kripto milik masyarakat bisa hilang dan tidak ada perlindungan," katanya.

Sidharta menegaskan, aset kripto merupakan komoditas yang hanya bisa diperdagangkan dan diinvestasikan di bursa berjangka. Aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. "Akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kita harus taat dengan undang-undang," katanya.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung *cryptocurrency* hanya sebagai aset. Sepanjang masih ada Undang-Undang Mata Uang, BI tidak akan pernah menganggap kripto sebagai mata uang. "Itu prinsipnya, [*Cryptocurrency*] hanya sebagai aset yang diperdagangkan, tidak lebih," ujarnya kepada GATRA.

BI juga mengimbau masyarakat agar memperhatikan asas kehati-hatian dalam berinvestasi di aset kripto. Hal ini karena aset kripto tidak memiliki dasar harga, sehingga menyebabkan nilai dari aset itu cenderung berfluktuasi. "Masyarakat harus memiliki pemahaman tersebut kalau ingin membeli aset kripto," ujarnya.

Mantan Kepala Grup di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI itu, mengatakan bahwa wacana bank-bank sentral dunia untuk menerbitkan *crypto currency* sebagai mata uang digital, sudah bermunculan. "*Tapi* ini baru wacana. Sudah ada beberapa bank sentral yang bereksperimen tetapi belum ada yang menggunakannya secara luas sebagai *substitute* dari mata uang yang ada," ujarnya.

BI sendiri, sambung Erwin, telah melakukan riset tentang Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam beberapa tahun ini. "*Tapi* sejauh ini, sebatas riset untuk melihat kemungkinan teknologinya, distribusinya ke masyarakat, juga manfaat dan mudaratnya buat perekonomian," katanya.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyambut baik adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatur aset kripto. Dengan begitu, pemerintah telah menciptakan iklim investasi aset kripto dan *blockchain* yang kondusif.

Aturan ini juga menambah daya pikat investor dalam negeri yang ingin berinvestasi aset kripto. Para investor tidak lagi takut, karena pemerintah sudah mengeluarkan aturan aset kripto. "Aset kripto dan *blockchain* perlu mendapatkan perhatian pemerintah seperti ini," ujarnya kepada GATRA.

Menurut Oscar, saat ini jumlah anggota di Indodax mencapai 2,4 juta akun. Volume transaksi di Indodax juga meningkat hingga mencapai Rp300 miliar per hari. "Artinya, minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto bertambah karena belakangan ini cukup banyak *trader* kripto yang mendapatkan profit cukup besar seiring positifnya *market* kripto," katanya. ■

HENDRY RORIS SIANTURI



Oscar Darmawan

GATRA/ARIO WIDIYANAH

SIDHARTA UTAMA
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Kalau Tidak Diatur, Bisa Capital Outflow

Pemerintah makin siap memasuki era *cryptocurrency*. Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), telah menerbitkan beberapa aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan perdagangan aset kripto.

Teranyar, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Beleid ini diharapkan bisa membantu masyarakat berinvestasi di bursa kripto dengan aman.

Di Indonesia, *cryptocurrency* lebih diartikan sebagai aset kripto, bukan mata uang kripto. Pasalnya, *cryptocurrency* seperti Bitcoin misalnya, belum bisa digunakan sebagai alat pembayaran. "Dia komoditi, jadi alat investasi," ujar Kepala Bappebti, Sidharta Utama, Rabu lalu.

Selama kurang lebih satu jam, Tim GATRA mewawancarai Sidharta tentang perdagangan aset kripto, melalui aplikasi Zoom. Berikut petikannya:

Pemerintah membolehkan *cryptocurrency* didagangkan di bursa berjangka, tetapi tidak bisa menjadi alat pembayaran?

Cryptocurrency itu bukan mata uang untuk transaksi pembayaran, tetapi dia komoditas. Sudah ada aturannya bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Jika aset kripto digunakan sebagai alat pembayaran, itu akan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Makanya, aset kripto ini enggak bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran.

Bappebti makin gencar mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto?

Jika tidak diatur di Indonesia, ada potensi masyarakat di Indonesia ini justru melakukan perdagangan jual beli aset kripto di perdagangan luar negeri. Maka, bisa berpotensi terjadi *outflow*. Padahal pasar di Indonesia cukup besar. Di samping itu, perlu diatur untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberi kepastian hukum kepada pedagang aset kripto tersebut.

Seberapa signifikan aliran modal lari ke luar negeri, jika perdagangan aset kripto tidak diatur?

Dengan berkembangnya internet, masyarakat Indonesia dapat melakukan perdagangan dengan para pelaku di luar negeri. Tentunya dana masyarakat Indonesia akan ditrasnfer ke luar negeri. Itu *capital outflow*. Kalau disediakan mekanasime perdagangan di Indonesia, maka mereka tetap *trading* di Indonesia.

Di Indonesia, aset kripto termasuk skala cukup besar dibandingkan negara-negara lain. Hal ini perlu dicermati. Makanya perlu dilakukan regulasi di Indonesia.

Para *trader* dan investor aset kripto beranggapan pembuatan aturan pemerintah tidak efektif, karena dengan teknologi *blockchain*, bursa kripto dapat mengatur dirinya sendiri?

Faktanya sekarang di lapangan, aset kripto yang beredar di dunia, cukup banyak yang belum masuk ke dalam *blockchain*. Keuntungan *blockchain* memang, kita bisa melakukan *tracing*. Bahkan kalaupun ada yang *nyuri*, itu bisa di-*tracing*, tapi kita enggak tahu ke depan, ada teknologi lain selain *blockchain*, dan itu memungkinkan. Maka itu, perlu ada *monitoring* melalui regulasi untuk menjamin keamanan. ■



DOK. HUMAS BAPPEBTI

GUGATAN PERDATA

Sengkarut Emas Crazy Rich Surabayan

PN Surabaya memutuskan PT Antam membayar Rp1,317 triliun atas kerugian materiil dan imateriil akibat selisih transkasi pembelian emas oleh seorang Crazy Rich asal Surabaya. PT Antam ajukan banding. Ulah sindikat?



Logam Mulia Antam

GATRA/ARDI WICI YANGAH

Respons cepat diambil PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang mengabulkan gugatan perdata atas nama Budi Said kepada perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor pertambangan itu. Hanya selang delapan hari dari putusan, PT Antam mengajukan banding. Kuasa hukum PT Antam, Harry Ponto, mengungkapkan bahwa pendaftaran banding dilakukan pada Kamis pekan lalu. Namun, Harry melanjutkan, ia belum membuat memori banding lantaran salinan putusan belum diterimanya.

"Kalau misalnya kami sudah menerima salinan, kami akan menyiapkan memori banding dan ini kemudian akan diberikan kepada pihak terkait untuk menyampaikan kontra memori apa tanggapan mereka," Harry mengungkapkan kepada Wahyu Wachid Anshory dari GATRA. Ia pun mempertanyakan mengapa salinan itu belum keluar. Menurut Harry, salinan tersebut penting untuk melihat pertimbangan majelis hakim, sehingga berbasis itu pihaknya dan tim bisa segera membuat memori banding.

Sebagai informasi, pada 13 Januari lalu, PN Surabaya memutuskan PT Antam selaku tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp817,46 miliar atau menyerahkan emas seberat 1,136 ton kepada Budi Said selaku penggugat. Apabila emasnya tidak diserahkan, maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan tersebut. Tidak hanya itu, Antam juga harus menggantikan kerugian imateriil sebesar Rp 500 miliar.

Kasus gugatan perdata ini bermula dari pembelian emas batangan Antam yang dilakukan pria yang dikenal sebagai salah satu "Crazy Rich Surabayan" ini. Total emas yang dibeli mencapai 7,071 ton dengan harga Rp 3,59 triliun. Emas itu dibeli Budi Said melalui seorang *freelance marketing* PT Antam bernama Eksi Anggraini. Dalam transaksi pembelian, disepakati Budi mendapat harga diskon, yakni per kilogram Rp530 juta di bawah harga resmi PT Antam. Namun dari 7,071 ton, Budi hanya menerima emas seberat 6,935 ton. Selisihnya sebanyak 1,136 ton tidak pernah diterima Budi.

Tak itu saja, Eksi juga menawarkan diri sebagai kuasa pembeli untuk mengurus administrasi dan meminta komisi Rp10 juta per kilogram emas yang dibeli Budi. Untuk meyakinkan Budi, Eksi mengaku memiliki 14 *funder* alias pembeli. Tawaran harga itu juga disampaikan Eksi saat Budi bertemu Endang Kumoro, Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya I PT Antam, dan Misdianto selaku tenaga administrasinya pada 19 Maret 2018 lalu. Serta melibatkan Ahmad Purwanto, karyawan PT Antam di Jakarta, sebagai pengawas penjualan di BELM Surabaya.

Sebagai informasi, kini Eksi sedang menjalani persidangan atas kasus pidana yang dilaporkan Budi Said. Sedangkan di kasus yang sama, Endang telah divonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan Misdianto divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Adapun Ahmad divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Dikutip dari putusan pidana Endang cs, dua faktur dibuat oleh Misdianto, harga yang tertera di faktur diklopkan dengan jumlah uang yang ditransferkan Budi, yakni Rp 3,59 triliun. Emas dikirimkan sebanyak enam tahap, yakni 325 kilogram pada 16 November 2018, masing-masing 200 kilogram pada 23 November 2018, 30 November 2018, dan 7 Desember 2018. Berikutnya, 161 kilogram pada 14 Desember 2018 dan 50 kilogram pada 21 Desember 2018.

Menurut Harry, kasus ini tak lepas dari peran Eksi dan Endang cs. "Ada semacam, apa boleh kita katakan sindikat, jadi ada pihak swasta bekerja sama dengan pegawai PT Antam yang di bursa emas dan logam mulia di Surabaya. Mereka mencari orang mau transaksi di harga diskon," katanya. Padahal, ia menegaskan, tidak ada pembelian emas di PT Antam dengan harga diskon, sebab transaksi berlaku sesuai harga di hari itu.

Terkait dengan banding yang dilakukan PT Antam, kuasa hukum Budi Said, Ening Swandari, masih enggan memberikan pernyataan. Ia menyebut belum mau berkomentar apa pun sebelum ada hasil sidang banding tersebut. "Kami masih tunggu putusan resminya ya. Jadi tidak wawancara dulu," ucapnya.

Menariknya, di luar Budi Said ternyata ada nama lain yang juga menjadi korban, yakni Adiyanto Wiranata yang melakukan pembelian 43,7 kilogram emas senilai Rp27,25 miliar.

Kasus Gugatan Pembelian EMAS DI ANTAM

1 Gugatan Atas Nama BUDI SAID

Kerugian Materiil:
Rp**817.465.600.000**,-

Kerugian Immateril:
Rp**500** Miliar

Status:
- 13 Januari
  Majelis Hakim PN Surabaya putusan mengabulkan gugatan penggugat
- 21 Januari
  PT Antam mengajukan Banding



2 Gugatan Atas Nama DANIEL KRISTANTO

Kerugian Materiil :
- Meminta pengembalian emas sejumlah **36,078** kg
- Meminta emas **2,405** kg sebagai penggantian kerugian materil selama 16 bulan sejak Oktober 2018 - 25 Februari 2020 (gugatan didaftarkan)
- Pengganti bunga emas batangan sebesar **5**% per tahun dari emas **36,078** kg sejak gugatan diajukan hingga putusan inkracht

Status:
26 Januari 2020
- Putusan



3 Gugatan Atas Nama ADIYANTO WIRANATA

Kerugian Materiil:
Rp**27.250.397.000.000**

Kerugian Immateril:
Rp**108** miliar



Lainnya:
Antam dibebankan bunga **7**% sejak gugatan 12 September 2019 hingga putusan *inkracht*

Status:
22 Oktober 2020
lawyer mendaftarkan Memori Kasasi pada PN Surabaya

Sumber: SIPP PN Surabaya dan data diolah

Dalam kasus ini, PN Surabaya telah memutus PT Antam untuk mengembalikan uang sejumlah tersebut ditambah keuntungan per bulan sebesar 7% dihitung sejak gugatan 12 September 2019 hingga putusan berkekuatan hukum pasti (*inkracht*).

Menurut kuasa hukum Adiyanto, Rendi Johanis Rompas, saat ini kliennya belum mendapatkan pengembalian uang tersebut. Ia harus menunggu tiga hingga enam bulan ke depan sebelum kasus tersebut sah di tingkat kasasi atau banding. Yakni, menunggu proses pemeriksaan berkas persidangan oleh pengadilan tinggi selama persidangan. "[Uang pembelian emas dari Adiyanto] belum dikembalikan. Menunggu keputusan tetap atau *inkracht*," kata Rendi.

Adiyanto merupakan pelanggan tetap PT Antam sejak 2018 lalu. Sebenarnya ada 11 kali pembelian emas yang dilakukannya, namun yang terkendala adalah transaksi ke-10 pada Oktober 2018. Rendi menuturkan, kliennya sudah mentransfer dana ke rekening PT Antam sesuai pesanan dan faktur pembayaran pun sudah ditandatangani pembeli. "Ketika proses pembelian, uangnya sudah ditransfer ke Antam, lalu keluar faktur untuk pengambilan barang. Nah, fakturnya keluar, tapi barangnya enggak dapat," tutur Rendi.

Rendi mengatakan bahwa pihak PT Antam mengklaim Adiyanto sebagai penggugat telah membuat surat kuasa kepada Eksi Anggraini untuk mengambil emasnya. Namun, PT Antam tidak dapat membuktikan sejumlah pernyataan tersebut. "Dalil mereka bahwa Pak Adiyanto ini sudah memberikan surat kuasa kepada Eksi untuk mengambil emas tersebut. Tapi, fakta di persidangan, [dalil PT Antam] itu tidak muncul," tuturnya.

Terlepas dari kasus tersebut, Harry menyebut bahwa kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum PT Antam merupakan hal yang tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. "Kalau pegawai menipu itu sudah di luar pertanggungjawaban PT Antam. Buktinya pegawai itu sudah dipidana. Berarti dia oknum. Dia tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang digariskan," Harry menegaskan.

Harry menyayangkan hal tersebut. "Kita respek pada putusan pengadilan. Tapi kita melihat pengadilan terlalu jauh dalam membuat keputusan ini. Apalagi ini menyangkut BUMN menyangkut negara untuk membayar kerugian seperti ini," dia menerangkan.

Sementara itu, peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menyebut, pembeli potensial seharusnya tidak boleh hanya mengandalkan informasi sepihak dari *marketing*. Ia seharusnya bisa berkontak dengan manajemen Antam untuk bertanya lebih jauh apakah perusahaan memberikan harga diskon atau tidak. "Informasi dari manajemen perusahaan sangat penting, agar pembeli emas bisa mengambil keputusan bertransaksi secara benar dan mengetahui modus *marketing*," kata Ferdy. Hal lainnya juga pastikan keamanan lakukan pembelian secara langsung dengan pihak PT Antam.

Sementara itu, pengamat hukum bisnis dari Universitas Prasetiya Mulya, Rio Christiawan, menilai perkara hukum yang menjerat Antam dan Budi Said ini harus dibuktikan dengan dokumen dari transaksi pembelian tersebut. "Kuncinya apakah ada dokumen yang menunjukkan diskon. Sepanjang bisa dibuktikan diskon dengan dokumen layak, Antam serahkan barang dan klaim pembeli dikabulkan," kata Rio.

> "Kuncinya apakah ada dokumen yang menunjukkan diskon. Sepanjang bisa dibuktikan diskon dengan dokumen layak, Antam serahkan barang dan klaim pembeli dikabulkan."
>
> Rio Christiawan

Namun pertanyannya, Rio melanjutkan, jika jumlah uang yang diberikan kurang, lalu mengapa PT Antam tetap mengirimkan barang. "Jadi perdebatannya adalah apakah kontrak pembelian yang dimiliki PT Antam dan Budi Said sama, lalu di mana celahnya," katanya. Pembuktian dari kedua pihak harus dilihat berdasarkan kerunutan dokumen. "Kalau ada dokumen diskon, artinya tunjukkan volume yang didapat oleh pembeli. Hal itu harus diverifikasi," ia menegaskan.

Demikian halnya dengan kasus Adiyanto, menurut Rio, jika Antam dapat membuktikan keabsahan surat kuasa itu akan menjadi posisi kuat secara hukum. Misalnya, jika ternyata ada surat palsu, maka kasus pidana akan melekat pada yang memalsukan. Pertanyaannya kembali pada keabsahan surat tersebut. "Untuk pembeli iktikad baik bayar sesuai dokumen, hak tetap diberikan Antam terlepas Antam laporkan Eksi (kasus pidana --*Red.*). Yang menarik harus dilihat apakah dokumen Eksi ke pembeli dengan yang diberikan Eksi ke Antam adalah dokumen sama. Harus periksa dulu, dokumen kedua belah pihak," Rio mengungkapkan. ■

BIRNY BIRDIENI
DAN ARYO MAHENDRO (SURABAYA)



GATRA/ARDI WIDIYANSAH

> "Kalau pegawai menipu itu sudah di luar pertanggungjawaban PT Antam. Buktinya pegawai itu sudah dipidana. Berarti dia oknum, dia tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang di gariskan."
>
> Harry Ponto

PEMECATAN KETUA KPU

Bara Rivalitas Penyelenggara Pemilu

DKPP berhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU. Dianggap terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ketegangan relasi antar-lembaga penyelenggara pemilu atau sekadar menjalankan peran?



ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA

Mantan Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama Plt Ketua KPU Ilham Saputra (kanan) berpose usai memberikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan DKPP dalam perkara pemberhentian ketua KPU di Jakarta

Dikawal dua ajudannya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik keluar dari lift dan berjalan menuju deretan sofa di salah satu sudut lobi Hotel Grand Mercure, Jakarta Barat, Selasa lalu. "Mengerikan sekali," ucap Evi kepada GATRA sesaat sebelum duduk di sofa. Ucapan tersebut agaknya bisa menggambarkan situasi pelik yang tengah dihadapi lembaga tempatnya bekerja saat ini pascaputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU.

Arief Budiman, rekan sejawat sekaligus atasan Evi di KPU, diberhentikan oleh DKPP karena dianggap terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang DKPP oleh Ketua DKPP, Muhammad, pada Rabu, 13 Januari lalu. DKPP kemudian memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. DKPP juga menunjuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan tersebut.

Dua hari pasca-pembacaan putusan, enam anggota KPU, termasuk Arief dan Evi, menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan. Hasilnya, Ilham Saputra terpilih sebagai pelaksana tugas Ketua KPU secara aklamasi.

Sanksi berat yang dijatuhkan DKPP kepada Arief merupakan buntut panjang dari pemecatan Evi, yang juga dilakukan oleh DKPP. Putusan itu diketuk palu pada 18 Maret 2020 silam. DKPP menyatakan Evi harus bertanggung jawab atas ketidakpastian hukum dalam sengketa hasil pemilihan umum calon anggota legislatif (pileg) DPRD Kalimantan Barat antara dua calon legislatif dari Partai Gerindra, yakni Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon. Keduanya bersengketa terhadap perolehan suara di 19 desa. Saat itu, Evi masih menjabat sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu KPU.

Beberapa hari setelah putusan DKPP, Presiden Joko Widodo menindaklanjutinya dengan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020. Berdasarkan Keppres itu, Evi resmi diberhentikan sebagai komisioner KPU secara tidak terhormat per 23 Maret 2020.

Tidak terima dengan pemberhentiannya, pada 17 April 2020, Evi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kemudian, Iupri —yang merupakan mantan anggota KPU Kabupaten Mesuji, Lampung— melapor ke DKPP bahwa dirinya melihat Arief turut menyertai Evi ketika mengajukan gugatan ke PTUN. Hasil dari tindak lanjut laporan tersebut, DKPP menyatakan bahwa kehadiran Arief merupakan pembangkangan terhadap putusan DKPP.

Evi mengungkapkan, keputusan DKPP terhadap Arief ini berlebihan. Saat mendaftarkan gugatan ke PTUN, Evi bercerita, ia bersama kuasa hukumnya datang ke Gedung PTUN pada pukul 07.00 WIB, dan Arief datang menyambanginya pada jam makan siang. "Sampai pukul 11.00 [siang], kami masih di situ karena ada persoalan administrasi. Pak Ketua (Arief Budiman) datang menjumpai saya, karena dia berempati kepada saya," kata Evi.

> "Bagi saya, menghormati putusan pengadilan adalah suatu bentuk menjalankan etika."
>
> Evi Novida Ginting Manik

Pada 23 Juli, hasil putusan PTUN keluar. Hasilnya, majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan yang diajukan Evi. Dalam amar putusan itu, Keppres pemberhentian Evi sebagai Komisioner KPU dinyatakan batal secara hukum. Selain itu majelis juga memutuskan agar tergugat, Presiden Joko Widodo, mencabut Keppres pemberhentian Evi sebagai Komisioner KPUdan wajib merehabilitasi nama baik Evi serta memulihkan kedudukannya sebagai komisioner KPU.

Atas putusan itu, Presiden selaku tergugat tidak mengajukan banding. Namun, Evi mengungkapkan, DKPP justru enggan menerima putusan pengadilan terhadapnya, dan tetap tidak mengakui dirinya sebagai komisioner KPU. "Bagi saya, menghormati putusan pengadilan adalah suatu bentuk menjalankan etika," kata Evi.

Menindaklanjuti hasil putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Evi, KPUmenerbitkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020, pada 18 Agustus 2020. Lagi-lagi, surat KPU ini menjadi masalah bagi DKPP. Majelis berdalih bahwa surat tersebut adalah upaya Arief selaku Ketua KPU untuk mengaktifkan kembali Evi sebagai komisioner. Evi menjelaskan bahwa surat dibuat berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota KPU, maka surat itu merupakan suatu putusan institusi, bukan keputusan Ketua KPU semata.

Evi menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kedudukan DKPP. Dalam penilaian Evi, DKPP terkesan menjadi *superbody* dan tanpa pengawasan. Evi juga berharap para pembuat undang-undang (UU) melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kedudukan DKPP di dalam UU. "Untuk menempatkan kembali lembaga-lembaga pemilu agar lebih tepat dalam pembagian kewenangan, sehingga tidak saling menegasi dan menghegemoni satu sama lain," tutur Evi.

Kepada GATRA, Ketua DKPP Muhammad mengungkapkan bahwa putusan pleno DKPP menjadi titik finis Arief Budiman sebagai Ketua KPU. DKPP, kata Muhammad, menilai Arief sudah tidak dapat lagi dipercaya sebagai ketua penyelenggara pemilu. "Putusan pleno tentang pemberhentian sebagai Ketua KPU kepada Arief Budiman diambil dengan musyawarah suara mayoritas, lima sependapat, satu abstain dan satu berbeda pendapat," ujar Muhammad.

Menurut Muhammad, semua skema sidang disiarkan secara terbuka. Ditambah lagi, Arief Budiman juga mengikuti sidang dengan seksama sedari awal. "Yang pertama, Pak Arief dan ahli yang dia ajukan sudah didengar dalam sidang. Yang kedua, semua keterangan pengadu, teradu, ahli serta alat bukti telah dipertimbangkan dan dinilai oleh majelis," ia mengungkapkan.

> "Putusan pleno tentang pemberhentian sebagai Ketua KPU kepada Arief Budiman diambil dengan musyawarah suara mayoritas, lima sependapat, satu abstain, dan satu berbeda pendapat."
>
> Muhammad

Yang ketiga, Muhammad melanjutkan, SK Presiden yang mencabut SK Presiden sebelumnya sudah tepat sebagai pejabat administrasi. Presiden tidak secara utuh menjalankan putusan PTUN, terutama amar poin empat agar Presiden merehabilitasi Evi Novida Ginting dan amar poin lima agar Presiden mengembalikan keanggotaan Evi Novida Ginting seperti semula sebagai anggota KPU. "Presiden memahami betul bahwa amar empat dan lima adalah non-eksekusi karena amar empat dan lima adalah kewenangan DKPP," Muhammad menerangkan.

Di sisi lain, Muhammad juga membantah bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba DKPP dengan lembaga penyelenggara Pemilu lain. Menurutnya, apa yang dilakukan DKPP adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi. Ia juga enggan berkomentar tentang revisi undang-undang pemilu yang bersinggungan dengan kewenangan lembaga penyelenggara. "[Soal UU Pemilu)] itu wilayah pembuat Undang-undang," ucapnya,

***

Tentang putusan DKPP itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil melihat bahwa secara wewenang, DKPP memang bisa memutus pelanggaran etik dan memberhentikan Ketua KPU. Itu adalah proses yang normal. Namun, persoalan ini tidak bisa hanya dibaca di permukaan saja.

Menurut Fadli, kejadian ini tidak terlepas dari konteks rivalitas atau ketegangan relasi antar-lembaga penyelenggara pemilu. Terutama dalam hal ini KPU dengan DKPP. "Sangat terlihat sekali ada semacam kemarahan, ada semacam arogansi yang terlihat di lembaga DKPP," kata Fadli melalui sambungan telepon kepada Wahyu Wachid Anshory dari GATRA, Sabtu pekan lalu.

Relasi kelembagaan ini juga tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Perbaikan kewenangan dan relasi kelembagaan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dinilai Fadli perlu diperbaiki. Tentang DKPP, misalnya, Fadli melihat lembaga ini sudah terlalu jauh menerjemahkan pelaksanaan kewenangannya dalam menegakkan etik penyelenggara pemilu.

Untuk beberapa putusan, kata Fadli, memang patut diapresiasi. Misalnya keputusan cepat dan tegas DKPP terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena tersangkut kasus suap. Tetapi ada juga beberapa putusan DKPP yang dinilai Fadli sudah masuk ranah administrasi pemilu. "Itu yang harus seharusnya dijadikan sebuah evaluasi yang sangat mendasar," ujarnya.

Fadli menggarisbawahi bahwa yang harus dilakukan sekarang adalah membuat sistem baru. Sistem ini tidak menambah kewenangan lembaga atau tidak menambah institusi untuk mengawasi lembaga independen. Cukup pengawas internal yang melekat dalam KPU atau Bawaslu saja tapi dia bekerja dengan fungsi yang terukur. "Agar institusi lembaga penyelenggara pemilu ini [sekaligus] menjadi organ yang sudah menjaga etik. Tidak menjadi institusi yang berdiri sendiri seperti sekarang," Fadli menguraikan.

Sementara itu, pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menyayangkan perlawanan yang dilakukan Arief dan Evi atas putusan DKPP dengan mengatasnamakan KPU. Menurutnya, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, seharusnya Arief dan Evi bisa melihat keputusan DKPP sebagai suatu peringatan penting.

Perlawanan yang dilakukan Arif dan Evi dengan membawa nama KPU malah menunjukkan seolah-olah terjadi persaingan atau persoalan antar-lembaga pemilu. Padahal, Hadar melanjutkan, tiap-tiap lembaga hanya sedang berusaha menjalankan perannya sebaik mungkin.

Hadar, yang juga pernah menjabat sebagai Komisioner KPU pada 2012-2017, bercerita bahwa selama menjabat, pihaknya pernah dua kali diproses DKPP. Namun, tidak ada perlawanan seperti saat ini lantaran KPU waktu itu menganggap putusan DKPP sebagai sesuatu yang sudah final meskipun sebagian besar anggota KPU tidak puas.

"Kami menempatkan proses ini sebagai suatu hal yang untuk kita itu lebih berhati-hati. Sekarang ini, mungkin ya, karena mereka banyak sekali terima peringatan-peringatan, mulai dari pergantian divisi, peringatan keras, hingga peringatan keras terakhir," ujar Hadar kepada Ryan Puspa Bangsa dari GATRA.

Bagi Hadar, tidak ada konflik antar-lembaga pemilu yang terjadi dalam permasalahan ini. Bahkan, ia menilai analisis-analisis yang menyebut adanya konflik kepentingan dalam permasalahan ini salah besar. Kalaupun memang ada konflik kepentingan, seharusnya bisa dibuktikan secara gamblang. "Saya malah melihat, mereka ini berusaha menjalankan perannya semaksimal mungkin. Jadi mereka (DKPP) melihat ada yang melanggar, ya harus diproses," ucapnya. ■

HIDAYAT ADHININGRAT P., M. ALMER SIDQI, DAN M. GURUH NUARY



GATRA/ARDI WIDYANSAH

Evi Novida Ginting Manik



GATRA/ARDI WIDYANSAH

TIMUR TENGAH

Rekonsiliasi Damai di Teluk Persia

Setelah tiga setengah tahun, blokade kuartet Arab terhadap Qatar kembali dibuka. Membuka peluang rekonsiliasi dengan Iran, Qatar siap menjadi mediator.



Pangeran Arab Saudi Mohammad bin Salman (kanan) bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dalam KTT Arab Teluk di Al-Ula, Arab Saudi



BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT/HANDOUT VIA REUTERS

Penerbangan antara Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) kembali mengudara pada Senin, 18 Januari lalu, setelah diblokir selama tiga setengah tahun. Hari itu, layanan Egyptair lepas landas dari Bandara Doha ke Kairo. Kemudian diikuti oleh kedatangan pesawat Air Arabia dari Kota Sharjah di UEA ke Doha.

Lalu-lalang penerbangan ini menjadi salah satu penanda kembali membaiknya hubungan antara Qatar dan negara Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerja Sama Teluk yang terjadi sejak 5 Juni 2017 lalu. Ketika itu, hubungan di negara-negara Arab memburuk saat kuartet Arab Saudi dan sekutunya, UEA, Bahrain, serta Mesir, memberlakukan blokade hubungan diplomatik, perdagangan, dan perjalanan terhadap Qatar.

Sengketa itu mengisolasi negara teluk kecil itu dan menjerumuskan kawasan tersebut ke dalam krisis diplomatik yang tidak terlihat sejak perang pada 1991 lalu saat melawan Irak. Sengketa juga mengungkap perbedaan ideologis yang dalam di kawasan itu. Kuartet Arab itu juga menuduh Qatar mendukung terorisme dan terlalu dekat dengan Iran. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh Doha. Sebagai informasi, GCC adalah aliansi ekonomi yang terdiri dari enam negara di jazirah Arab, yakni Arab Saudi, UEA, Bahrain, serta Kuwait, Oman, dan Qatar.

Dalam laporan *NBC News* pada KTT Tahunan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di kota kuno Al-Ula pada Selasa, 4 Januari lalu, para pemimpin Arab saudi, Qatar, dan negara anggota dari GCC ditambah Mesir, berjanji menjalin solidaritas. Pada momen yang sama juga ditandatangani kesepakatan yang menandakan kembalinya aksi ke arah normal di kawasan Teluk Persia tersebut.Pada hari itu, untuk pertama kalinya sejak perselisihan pecah pada 2017, Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, tiba di Arab Saudi. Ia disambut dengan pelukan dari Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Pertemuan itu dinilai menandai hubungan yang menghangat antara kedua negara.

Islah di negara teluk ini tak lepas dari peran Kuwait sebagai mediator. Bahkan KTT itu diadakan sehari setelah Kuwait mengumumkan Arab Saudi dan Qatar telah mencapai kesepakatan untuk membuka kembali wilayah udara, perbatasan darat, dan laut antara kedua negara tersebut. Selain itu, untuk mengatasi dampak krisis Teluk.

Kementerian Luar Negeri Mesir telah setuju melanjutkan hubungan diplomatik dengan Qatar. "Republik Arab Mesir dan negara bagian Qatar telah bertukar dua catatan resmi hari ini, 20 Januari berdasarkan kesepakatan dua negara untuk melanjutkan hubungan diplomatik," demikian ucapnya, seperti dikutip dari *Al Jazeera*.

Menurut dua sumber intelijen Mesir kepada *Reuters*, Kementerian Luar Negeri Qatar mengadakan pertemuan dengan Pejabat Keamanan Mesir dan UEA pada Sabtu lalu. Hasilnya, Qatar tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negeri Mesir. Sumber intelijen Mesir itu juga mengatakan, para pejabat menyetujui kerja sama ekonomi dan serangkaian pertemuan tentang masalah-masalah luar biasa, seperti Libya dan Ikhwanul Muslimin. Para pejabat setuju untuk

memulihkan hubungan diplomatik antara Mesir dan Qatar yang masuk dalam fase "masa percobaan".

Namun hal itu dibantah oleh Pejabat Qatar bahwa tidak ada pertemuan tersebut. Menurut sumber itu, hubungan diplomatik dipulihkan melalui korespondensi tertulis yang merujuk pada Perjanjian Al-Ula.

***

Bila komunikasi Qatar dengan UEA dan Mesir terlihat baik, tidak demikian dengan Bahrain. Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al Zayani, mengkritik Qatar karena dinilai tidak mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalahnya dengan negara monarki di Teluk Persia itu. Pertanyaan itu disampaikan dalam posting kementeriannya di Twitter. "Qatar tidak menunjukkan inisiatif apa pun setelah KTT di Al-Ula (Arab Saudi) untuk menyelesaikan masalah yang tertunda dengan Bahrain," kata Al Zayani dikutip dari *MEMO, Middle East Monitor*.

Al Zayani juga mengungkapkan, kementeriannya mengirim surat tertulis kepada mitranya dari Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ia meminta Doha mengirim delegasi resmi untuk memulai pembicaraan antara keduanya,tetapi belum menerima balasan dari Qatar."Menantikan proses baru dalam hubungan dengan Qatar yang mempertimbangkan hak dan kepentingan masing-masing negara melalui mekanisme jelas untuk memastikan hubungan yang lebih seimbang," katanya.

Terlepas dari protes Bahrain tersebut, berakhirnya konflik di Teluk Persia dengan dibukanya blokir Qatar ini dinilai akan berdampak pada hubungan dengan Iran. Peneliti senior di Pusat Studi Strategis Timur Tengah (CMESS) di Iran, Abas Aslani, mengatakan bahwa rekonsiliasi krisis Teluk memang tidak akan memengaruhi hubungan bilateral Teheran dan Doha. Namun hal ini akan memberikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

> "Qatar telah menyatakan kesediaannya untuk memainkan peran (mediator damai dengan Iran-red) tersebut. Namun kami harus diundang oleh kedua belah pihak, yang masih ragu untuk mengambil langkah ini, dalam hal masuk dan terlibat dalam negosiasi langsung."
>
> Lolwah al-Khater

"Perdamaian antara Arab Saudi dan Qatar tidak akan melemahkan hubungan antara Doha dan Teheran. Qatar akan menjaga hubungannya dengan Iran," katanya kepada *Anadolu Agency*. Namun demikian, menurutnya, Qatar dapat menggunakan perkembangan ini sebagai kesempatan untuk mediasi antara Iran dan negara-negara Arab di kawasan Teluk.

Pakar politik Payman Yazdani juga berpendapat, Qatar tidak akan mengikuti kebijakan anti-Iran setelah menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi. "Pemerintah Qatar mengikuti kebijakan yang seimbang antara Iran dan Arab Saudi jika konflik antara Doha dan Riyadh kembali sebagai masalah di masa depan," katanya.

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lolwah al-Khater, mengisyaratkan bahwa negaranya mau menjadi penengah antara Iran dan Amerika Serikat dengan telah berakhirnya kepemimpinan Presiden dari Donald Trump ke Joe Biden. Doha juga berkomitmen untuk terlibat dalam dialog konstruktif antara Teheran dan negara Arab di Teluk Persia. "Qatar telah menyatakan kesediaannya untuk memainkan peran (mediator damai dengan Iran-red) tersebut. Namun kami harus diundang oleh kedua belah pihak, yang masih ragu untuk mengambil langkah ini, dalam hal masuk dan terlibat dalam negosiasi langsung," kata al-Khater kepada kantor berita *EFE* Spanyol seperti dikutip *Tehran Times*.

Menurut al-Khater, Amerika Serikat berperan penting membuka dialog dengan Iran. Tidak kalah penting dari itu, yakni komunikasi Iran dengan negara GCC. "Dialog yang bermakna dan konstruktif dengan Iran, dialog yang akan melestarikan kolektif keamanan wilayah kami, hak-hak masyarakat kami, dan menjamin masa depan yang sejahtera bagi generasi mendatang," ia menegaskan.

Dalam hal ini, al-Khater mengungkapkan bahwa hubungan perdagangan Qatar dengan Iran dan Turki selama krisis blokade ini telah membantu pertumbuhan PDB dari negara emirat di semenanjung kecil Jazirah Arab tersebut. Menurutnya, Doha telah mendiversifikasi rantai pasokan dan memperkuat posisi sebagai pengekspor energi terbesar secara global.



REUTERS/AHMED YOSR

Masyarakat menyambut kedatangan kerabatnya dari Doha, Qatar setelah membaiknya hubungan kedua negara di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi

"Blokade adalah situasi yang tidak kami pilih, pastinya.Namun kami mampu menghadapi dan mempertahankan situasi. Mengakhiri blokade adalah tentang kepentingan kolektif seluruh wilayah kami, tidak hanya untuk kepentingan Qatar," ia menegaskan.

Pernyataan al-Khater ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyerukan dialog antara Iran dan tetangga Arabnya untuk menyelesaikan perbedaan. Ia mengungkapkan harapan bahwa kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan puncak untuk mengurangi ketegangan. "Saya baru saja menyebutkan kepada Anda bahwa ada perbedaan antara negara-negara dalam cara mendekati dialog semacam itu. Juga dari pihak Iran. Mereka telah beberapa kali menyatakan kesediaannya untuk terlibat dengan negara-negara GCC," katanya dalam wawancara baru-baru ini dengan *Bloomberg TV*.

Bin Abdulrahman menggarisbawahi bahwa waktunya harus tiba ketika negara-negara Arab Teluk Persia akan duduk di meja dengan Iran dan mencapai pemahaman bersama. "Kami harus hidup bersama. Kita tidak bisa mengubah geografi. Iran tidak dapat memindahkan GCC dari lingkungannya dan GCC tidak dapat memindahkan Iran dari lingkungan tersebut," lanjutnya.

Di sisi lain, Iran menyambut baik seruan Qatar untuk berdialog dengan negara-negara Arab di Teluk Persia. "Iran menyambut baik panggilan saudara saya FM @ MBA_AlThani untuk dialog inklusif di wilayah kami. Seperti yang telah kami tekankan secara konsisten, solusi untuk tantangan kami terletak pada kolaborasi untuk bersama-sama membentuk 'wilayah yang kuat': damai, stabil, sejahtera & bebas dari hegemoni global atau regional," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam twit-nya. ■

BIRNY BIRDIENI

AMERIKA SERIKAT

Biden Batalkan Kebijakan Trump

Usai pelantikannya sebagai Presiden AS ke-46, Joe Biden segera menandatangani sejumlah perintah eksekutif. Fokus pada penanganan pandemi dan banyak membatalkan kebijakan-kebijakan kontroversial Trump. Dalam enam hari, ia telah mengeluarkan 33 keppres.



REUTERS/TOM BRENNER

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih setelah pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46, di Washington, Amerika Serikat

Inagurasi Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-46 pada Rabu, 20 Januari lalu, berjalan lancar. Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts, mengambil sumpah Biden yang ditemani istrinya, Jill Biden.Adapun Hakim Agung Sonia Sotomayor, mengambil sumpah Harris, yang mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama menempati posisi Wapres AS.

Semua mantan presiden dan wakil presiden, termasuk Mike Pence, terlihat hadir di Capitol Hill, Washington, D.C. Pengecualian hanya Donald dan Melania Trump. Beberapa jam sebelumnya, Trump menggelar upacara perpisahan tersendiri. Ia menolak menyebut nama Biden pada pidato singkatnya yang sebagian besar berisi puja-puji terhadap para pendukung dan mengumbar kesuksesan kabinetnya. Keduanya lantas bergegas memasuki Air Force One untuk terakhir kalinya di Joint Base Andrew, Maryland, menuju Mar-a-Lago, Florida.

Biden menggaungkan persatuan AS dalam pidato pelantikannya. "Amerika telah terbukti bertahan dari berbagai Perang Dunia, resesi ekonomi yang dahsyat, bahkan serangan teroris 11 September. Namun kita bisa melewatinya, kita tidak pernah gagal," ucapnya, dilansir *Reuters*.

Sehari kemudian, Pentagon mengeluarkan sebuah pengumuman terkait masalah keamanan. Setelah ditunda lebih dari 17 tahun, militer AS berniat hendak mengadili Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali.

Sidang atas pria yang dijuluki sebagai "Osama bin Laden Asia Tenggara" itu dilakukan bersama dua rekannya asal Malaysia, Mohammed Nazir Bin Lep dan Mohammed Farik Bin Amin. Ketiganya diduga berperan dalam pemboman klub malam di Bali 2002 dan pemboman Hotel JW Mariott di Jakarta pada 2003. Hingga hari ini, mereka masih mendekam di pangkalan militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

VOA menulis, Hambali (kini berusia 56 tahun) ditangkap di Thailand setahun setelah pengeboman di Bali. Ia sempat ditahan di salah satu penjara milik CIA di luar AS, sebelum dipindahkan ke Teluk Guantanamo. Pada 2016, *Washington Post* melaporkan Hambali ditahan di fasilitas Kamp 7 yang sangat rahasia, bersama sejumlah kecil tahanan, termasuk yang dituduh mengatur serangan teroris 11 September 2001.

> "Amerika telah terbukti bertahan dari berbagai Perang Dunia, resesi ekonomi yang dahsyat, bahkan serangan teroris 11 September. Namun kita bisa melewatinya, kita tidak pernah gagal."
>
> Joe Biden

Keputusan ini mengejutkan pengacara militer yang ditunjuk mendampingi mereka, Mayor Korps Marinir James Valentine. Pasalnya, calon Menteri Pertahanan, Jenderal Lloyd Austin, baru saja menegaskan kembali niat untuk menutup Guantanamo di hadapan komite Senat. "Keputusan ini lebih pada langkah panik pemerintah bahkan sebelum terbentuk kabinet," kritik Valentine, dilansir *ABC News*.

***

Isu keamanan hanyalah satu dari 17 aksi pertama yang di tanda tangani Biden di Ruang Oval, Gedung Putih usai inaugurasi. Seluruh 17 aksi ini terdiri dari 15 perintah eksekutif (*executive order*) atau semacam keputusan presiden (Keppres), memorandum, dan perintah untuk beberapa agen yang telah dibentuk. Termasuk upaya untuk segera mengimpelementasikan langkah-langkah penanggulangan pandemi Covid-19 di AS, yang sudah merenggut nyawa hingga lebih dari 400.000 jiwa. Biden memerintahkan penggunaan masker dan menjaga jarak di semua gedung dan lahan federal.

Selain itu, Biden juga membatalkan kebijakan-kebijakan yang pernah diambil oleh Trump. Beberapa di antaranya, yaitu bergabung kembali dengan Paris Agreement dan kembali masuk sebagai anggota WHO. Dr. Anthony Fauci pun ditunjuk memimpin delegasi AS, demikian tulis *CNN*.

Biden mencabut pula izin dari Trump untuk pipa minyak Keystone XL yang direncanakan membentang di sepanjang AS-Kanada. Pada 2010 silam, pemerintah Kanada menyetujui proyek tersebut. Namun Presiden Barack Obama menutupnya pada 2015 karena masalah lingkungan. Namun pembangunannya dilanjutkan Trump pada 2017. Meski Kanada terus mendukung proyek itu, mereka kerap didemo aktivis lingkungan dan kelompok masyarakat adat.

Pipa sepanjang 1.947 kilometer tersebut awalnya dijadwalkan beroperasi pada 2023, yang akan mengalirkan hingga 830.000 barel minyak per hari dari Alberta ke Nebraska, dan melewati kilang di pesisir Texas.

Topik ini menjadi tema pertama yang dibahas Biden via telepon pertamanya ke pemimpin negara asing. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyatakan kekecewaannya atas keputusan Biden.

"Kegiatan Biden sebagai Presiden di hari pertama adalah membatalkan beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Trump dan mengimplemetasikan beberapa janji kampanyenya di pekan pertama ia menjadi Presiden ke-46 Amerika Serikat," ujar Juru Bicara Gedung Putih yang sudah ditunjuk oleh pemerintahan Biden, Jen Psaki.

Ada beberapa kebijakan Trump yang juga ditinjau ulang oleh Biden, antara lain masalah imigrasi dan pencabutan larangan perjalanan bagi warga negara-negara mayoritas Muslim. Ia mengakhiri pula deklarasi darurat nasional yang menjadi dasar mengalihkan sejumlah dana federal untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Dengan demikian, secara efektif akan menyetop pembangunan tembok pembatas.

Biden membatalkan beberapa kebijakan yang pernah diambil oleh Trump, lalu masuk kembali sebagai anggota WHO dan Dr. Anthony Fauci ditunjuk memimpin delegasi AS.

Pejabat tim transisi juga mengatakan, Biden akan memerintahkan lembaga federal untuk meninjau kebijakan yang memperkuat rasisme sistemis, mewajibkan pemerintah federal untuk tidak melakukan diskriminasi atas dasar identitas gender atau orientasi seksual, dan mencabut perintah Trump untuk mengeluarkan non-warga negara dari sensus AS. Termasuk mencabut kebijakan yang melarang pendanaan AS untuk kelompok internasional yang melakukan aborsi atau membantu wanita mendapatkan layanan aborsi.



REUTERS/TERRAY SYLVESTER

Joe Biden mencabut izin yang diberikan Trump untuk pipa minyak Keystone XL yang direncanakan membentang di sepanjang AS-Kanada

Biden juga berencana memenuhi janji kampanyenya, yaitu membantu warga AS yang mengalami kesulitan keuangan mengatasi efek pandemi. Ia akan memperpanjang penghentian sementara atas denda kredit. Ia juga meminta agen federal memperpanjang penangguhan penyitaan hipotek yang dijamin oleh pemerintah federal.

Presiden baru juga akan memberikan bantuan kepada siswa dengan pinjaman pendidikan besar dengan melanjutkan penangguhan pembayaran bunga pinjaman siswa di pemerintah pusat dan pokok selama delapan bulan ke depan. Sejumlah staf mengatakan, Biden akan mengambil lusinan keppres lainnya dalam sepuluh hari ke depan, karena ia berupaya untuk segera mengalihkan negara tanpa menunggu persetujuan kongres.

Pada Senin, 25 Januari 2021, Biden menandatangani perintah eksekutif yang akan memperkuat aturan seputar pengadaan pemerintah dalam upaya menopang manufaktur domestik dan mendorong pemerintah federal membeli lebih banyak produk yang dibuat di dalam negeri.

Salah satu kendala utama penanganan Covid-19 di AS adalah penundaan dalam mendistribusikan pasokan medis dan APD akibat ketergantungan pada impor.

Rencana "Beli Produk Amerika" Biden itu tentu akan mempersulit agen federal membuat kontrak dengan perusahaan luar negeri untuk membeli produk asing dengan mengurangi celah dan keringanan dalam aturan yang ada. Perintah ini membuat Kantor Manajemen dan Anggaran harus membentuk divisi baru yang khusus mengawasi masalah pembelian dan anggaran.

Bagi masyarakat AS, keputusan pembelian produk dalam negeri itu jelas menguntungkan. Kelompok bisnis kecil dan menengah bisa punya akses informasi yang lebih baik tentang kontrak dengan pemerintah federal. Mengingat pemerintah pusat bisa menghabiskan dana mencapai US$600 miliar (sekitar Rp8.500 triliun) per tahun untuk seluruh kontrak pengadaan.

Seorang pejabat senior di kabinet Biden mengatakan, langkah memperbaiki kelemahan dalam rantai pasok AS ini terinspirasi dari pandemi Covid-19. Selama ini, salah satu kendala utama penanganan Covid-19 di AS adalah penundaan dalam mendistribusikan pasokan medis dan APD akibat ketergantungan pada impor. Kebijakan baru itu diharapkan bisa memperkuat produksi dalam negeri.

Hitung punya hitung, dalam enam hari pertamanya menjabat, Biden telah menandatangani sebanyak 33 *executive order*. Hampir setengahnya terkait penanganan virus corona. ■

FLORA LIBRA YANTI



CINA

Tiongkok
Kembali Lockdown Menjelang Imlek

Otoritas Cina kembali memberlakukan *lockdown* setelah muncul banyak kasus positif Covid-19 baru. Penyebaran berawal dari banyaknya kegiatan perkumpulan, termasuk pesta pernikahan. Menjelang libur Imlek, kian banyak kota yang di-*lockdown*.



FOTO: CARLOS GARCIA RAWLINS

Warga antre untuk melakukan tes nukleat asam menyusul penyebaran virus Covid-19 di Beijing, Tiongkok

Ketika negara-negara lain masih meradang akibat anjloknya kondisi ekonomi di tengah pandemi, perekonomian Cina malah tumbuh positif setidaknya sejak per kuartal III 2020 silam. Terbaru, "Negeri Panda" tersebut menutup tahun dengan rekor pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%. Pada November, Dana Moneter Internasional (IMF) optimistis bahwa skor GDP Cina pada 2021 bisa mencapai kenaikan 8,2%, walau kemudian pada Januari direvisi menjadi 7,9%.

Namun kini angka pertumbuhan yang indah itu kembali berhadapan dengan musuh tangguh: virus Covid-19. Pada Rabu, 13 Januari lalu, Pemerintah Cina mengumumkan temuan sejumlah kasus baru di sebuah provinsi yang mengitari Beijing. Virus itu diduga berasal dari sebuah pesta pernikahan di suatu desa dan menyebar dengan cepat. Alhasil, rata-rata kasus yang muncul mencapai 109 per hari.

Otoritas lantas memberlakukan *lockdown* di sejumlah tempat, termasuk di tempat paling parah yaitu ibu kota provinsi Provinsi Hebei, Shijiazhuang. Kota ini adalah pusat transportasi dan manufaktur penting untuk area tersebut. Penguncian wilayah juga diberlakukan di kabupaten tetangganya, Nangong, beserta ibu kota Xingtai. Total 17 juta penduduk di wilayah ini dijadwalkan menjalani *lockdown* hingga Selasa, 19 Januari, tapi belakangan dicabut pada Sabtu, 16 Januari lalu.

Lockdown diperluas hingga mencakup kota lain di pinggiran Beijing, Langfang, serta sebuah kabupaten di Heilongjiang, provinsi wilayah timur laut negeri itu. Di daerah ini, *lockdown* diberlakukan hingga Senin, 18 Januari lalu, dan masih diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan.

Pemerintah Tiongkok menutup layanan transportasi serta membatalkan izin pelaksanaan pernikahan dan pemakaman. Bahkan, konferensi Partai Komunis provinsi pun dilarang.

Sejumlah distrik di ibu kota juga ditutup. Beijing mengatakan pada Jumat pekan lalu bahwa semua orang yang kembali ke Tiongkok dari luar negeri harus memantau kesehatan mereka selama tujuh hari setelah menyelesaikan karantina wajib selama 21 hari.

Pemerintah menutup layanan transportasi, membatalkan izin pelaksanaan pernikahan dan pemakaman, serta melarang konferensi Partai Komunis provinsi.

Semua orang lalu diwajibkan menjalani tes Covid-19, yang belakangan, seperti dilansir *The New York Times*, selesai dilaksanakan hanya dalam beberapa hari saja.

Dengan demikian, lebih dari 22 juta orang secara keseluruhan telah diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah. Ini merupakan dua kali lipat jumlah yang terkena dampak pada Januari 2020, ketika pemerintah pusat memberlakukan *lockdown* di Wuhan, tempat virus pertama kali dilaporkan muncul.

Sabtu, 16 Januari, mendadak muncul *superspreader*. Seorang *salesman* produk kesehatan diketahui telah berkeliling ke sejumlah kota di Provinsi Jilin. Deputi Direktur Komisi Kesehatan Jilin, Zhang Yang, menolak mengungkap detail identitas *salesman* tersebut. Pria berusia 45 tahun itu disebut tidak sadar telah menularkan virus corona karena kondisinya yang tanpa gejala (*asymptomatic*).

Akibatnya, menurut *South China Morning Post*, muncul 96 kasus infeksi Covid-19 baru dan 119 kasus tanpa gejala. Pemerintah pun melakukan *lockdown* pada dua kota di provinsi yang berbatasan langsung dengan Korea Utara itu. Penelusuran kontak mengungkapkan bahwa sebelum diidentifikasi, *salesman* itu naik kereta di ibu kota Provinsi Heilongjiang, Harbin, dan dari tiga kota di Jilin: Changchun, Tonghua, dan Gongzhuling.

Sejak penyebaran terbaru virus Covid-19, terjadi hampir 700 kasus penularan dan satu kematian pada awal tahun ini. "Sejak Desember 2020, klaster epidemi telah terjadi di Beijing, Sichuan, Liaoning, Hebei, dan Heilongjiang," ujar kepala Komisi Kesehatan Nasional (NHC), Ma Xiaowei.

NHC menuding penyebaran terbaru di wilayah timur laut itu akibat penularan dari sejumlah barang impor yang telah terkontaminasi, termasuk makanan beku dan dingin, kendati dia tak menunjukkan bukti nyata atas tudingan ini.

Meski demikian, pernyataan Ma bahwa penyebaran ini berasal dari pelancong yang baru kembali dari luar negeri, disepakati oleh banyak pihak. Otoritas menyebut, *lockdown* kemungkinan akan diperluas dan diperpanjang waktunya. Ada dua alasan untuk hal itu.

Pertama, ada kekhawatiran tentang varian virus yang lebih menular telah tiba di Cina. Termasuk varian dari Inggris dan Afrika Selatan. Namun, pemerintah masih memberlakukan pembatasan yang signifikan pada perjalanan dan periode karantina wajib yang diawasi, ada cukup banyak pergerakan penduduk, terutama melalui darat.



Xi Jinping

KCNA VIA REUTERS

> "Sejak Desember 2020, klaster epidemi telah terjadi di Beijing, Sichuan, Liaoning, Hebei, dan Heilongjiang."
>
> Ma Xiaowei

Kedua, hari raya Imlek yang jatuh pada 12 Februari mendatang. Tahun lalu, virus corona meletus persis sebelum liburan hari raya ini. Memastikan bahwa warganya tak perlu menghabiskan masa libur panjang dalam karantina adalah poin penting, baik untuk citra pemerintah maupun untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. Mengingat, Tahun Baru Lunar itu adalah momen belanja besar-besaran.

Kementerian Transportasi Tiongkok memperkirakan perjalanan liburan Imlek tahun ini turun 40% dibandingkan dengan 2019. Tetapi, tulis *The Guardian*, artinya masih ada jutaan orang akan menggunakan transportasi umum dalam waktu singkat.

Maraknya kasus di Hebei telah melemahkan klaim Presiden Xi Jinping bahwa virus itu telah dihancurkan pada 2020. Bahwa pihak Barat yang salah menangani pandemi, sehingga memungkinkan muncul gelombang kedua. Xi selama ini mengandalkan kebijakan wajib tes bagi orang-orang yang pulang kampung dari luar negeri. Dia juga terlalu percaya pada kebijakan pejabat daerah yang menerapkan aturan yang mengancam juga melakukan pembayaran kompensasi.

Pakar isu Cina dari Enodo Economics, Diana Choyleva, mengakui terus mengawasi kemampuan Tiongkok melewati Maret 2021 tanpa wabah yang merebak besar-besaran. "*Lockdown* kedua melemahkan narasi bahwa virus telah berhasil dikalahkan. Xi tidak dapat melakukan *lockdwon* lagi tanpa merusak momen perayaan 100 tahun Partai Komunis Cina pada Juli tahun ini. Keputusan itu tidak hanya akan merusak selebrasi, melainkan juga bisa memperlambat pemulihan ekonomi," ia mengungkapkan.

Consultancy Capital Economics telah memproyeksikan tingkat pertumbuhan Cina sebesar 10% tahun ini, meskipun bisa terjadi penurunan sepanjang tahun. "Hantaman terhadap konsumsi dan jasa sebagian besar harus diimbangi oleh pabrik yang dapat mempekerjakan lebih banyak staf untuk bekerja selama liburan daripada biasanya," kata ekonom senior Julian Evans-Pritchard.

***

Sementara itu, Beijing mengalami kemunduran lain pada pekan ini. Vaksin Covid-19 yang dikembangkan Cina terbukti jauh kurang efektif daripada produk-produk sejenis buatan negara lain. Vaksin Sinovac sudah tertinggal dalam uji coba. Salah satu alasannya, karena keberhasilan relatif Cina hanya didapat dari jumlah data yang sedikit.

Dengan hasil efikasi 50,2% di Brasil, produk akhir hanya menyandang skor sedikit di atas standar WHO untuk penerapan. Hasil sebelumnya mengklaim efisiensi yang lebih tinggi. Tetapi otoritas uji coba Brasil menurunkan skor akhir hasil saat mereka menerapkan standar pengujian yang lebih baik.

Media pemerintah Tiongkok mencoba memutar balik kabar tentang kegagalan tersebut. Tetapi itu tetap menjadi pukulan besar bagi Beijing, karena diplomasi vaksin makin memanas. Mengingat, kebutuhan negara-negara yang tak mampu membuat vaksin terus bertambah. Cina telah menjanjikan puluhan juta dosis ke negara-negara yang telah meneken MoU Belt and Road Initiative (BRI), yang terdiri dari 138 negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, pejabat tinggi di negara-negara itu sekarang cenderung mencari vaksin AS atau Eropa yang lebih efektif. ■

FLORA LIBRA YANTI

GATRA
MAJALAH BERITA MINGGUAN

SIUPP: No. 297/SK/Menpen/SIUPP/C.1/1994, tanggal 13 Oktober 1994. **ISSN:** 0853-1706

Pendiri:
M. Hasan
Penerbit:
PT Era Media Informasi
Komisaris:
Tommy S. Kusuma
Pemimpin Umum:
Hendri Firzani
Direktur Utama:
Hendri Firzani
Direktur Operasional:
Budi Irawan
Penasihat:
Edy Sumarso

MAJALAH GATRA
Pemimpin Redaksi:
Mukhlison S. Widodo
Redaktur Pelaksana:
Bambang Sulistyo, Sujud Dwi Pratisto (Pth)
Sidang Redaksi:
Aditya Kirana, Andhika Dinata, Birny Birdieni, Flora Libra Yanti, Gandhi Achmad, Hendry Roris P. Sianturi, Hidayat Adhiningrat P., Putri Kartika Utami, Sandika Prihatnala
Sekretariat Redaksi & Marketing:
Jumadi, Pamungkas Sapto Handoyo, Puspita Sari
Produksi:
Desain:
Amin S. Putra (Kepala), Fritz Pelenkahu, Rico Wahyu
Foto:
Ardi Widi Yansyah, Adi Wijaya, Eva Agriana Ali
Bahasa:
Agus Teguh (Kepala), Rhea Febriani Tritami

GATRA TV
Pemimpin Redaksi:
G.A. Guritno
Produser Special Program:
Cicilia Karina, Riana Astuti
Produksi:
Fandi, Karim, Sammy

GATRA.COM
Pemimpin Redaksi:
Mukhlison S. Widodo
Redaktur Pelaksana:
Nur Hidayat, Rohmat Haryadi
Sidang Redaksi:
Anthony Djafar, Bernadetta Febriana, Rosyid
Liputan:
Iwan Sutiawan (Koordinator)
Erlina Fury, M. Almer,
M. Guruh Nuary, Ryan Puspa,
Ucha Julistian, Wahyu Wachid
Biro Daerah:
Abdul Aziz (Pekanbaru), Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
Fotografer:
Jongki Handianto

GATRA PEDIA
Pemimpin Redaksi:
G.A. Guritno
Kepala Bagian:
Yustinus Sarjana
Produksi:
Endang Sukendar (Kepala)
Annisa Setya Hutami, Arif Sugiono, Fitri Kumalasari
Desain:
Anas Priyo (Kepala), Rio Nugroho
Foto:
Erfy Sudiyanto
Digital/Ecommerce & Data:
Fatikhin
Medsos & Event:
Fazri, Feby, Rikha

TIM PEMASARAN:
Kepala:
Vinca S. Soemantri (Wilayah I)
Gembong Wiroyudo (Wilayah II)
Wakil Kepala:
Cicih, Fahrudin
Group Head:
Leo Iqbal (Wilayah I)
Maria I. Pakpahan (Wilayah II)
Staf Pemasaran:
Edria Fausta K., Wanda Oktavia, Dewan Nugraha
E-mail: iklan@gatra.com

Staf Sirkulasi:
Yudi Riyanto, Jupri B. Dair
E-mail: sirkulasi@gatra.com

Business Development Marketing:
Fajar Lukito

Layanan Pelanggan:
Puspita Sari
Telepon: (021) 79196935
Fax: (021) 79196936
E-mail: langganan@gatra.com

Pencetak: PT. Naga Ular Bersatu, Jakarta

Alamat Kantor: Gedung GATRA, Jl. Kalibata Timur IV No. 15, Jakarta 12740
Telepon: (021) 7973535 (hunting), Fax: 79196941, 79196942, E-mail: redaksi@gatra.com



Secara prinsip, kebiri kimia adalah prosedur medis penghilangan hormon testosteron dari tubuh manusia

WWW.123RF.COM/ OLGA YASTREMSKA

KEBIRI KIMIA

Kebiri Kimia bagi Predator Seksual Anak

PP kebiri kimia bagi predator seksual anak diteken Presiden. Di dunia medis sudah biasa dilakukan untuk pasien kanker prostat. Dianggap tidak terlalu efektif.

Muh. Aris menjadi predator seksual anak yang diganjar hukuman kebiri kimia pertama di Indonesia. Pemuda berusia 22 tahun ini dinyatakan terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap sembilan anak di bawah umur. Selain hukuman kebiri kimia, Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. Vonis berat itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur, pada 2 Mei 2019.

Aris sempat mengajukan upaya banding, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menolak bandingnya. Karena Aris tidak mengajukan kasasi, vonis itu dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kemudian Agustus tahun lalu, pihak kejaksaan melakukan eksekusi atas vonis tersebut. Meski Aris sudah dijebloskan di sel penjara, hukuman kebiri kimianya belum bisa dilaksanakan. Sebab kala itu peraturan teknis pelaksanaan hukumannya belum ada.

Di penghujung tahun 2020, barulah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Beleid tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Desember lalu. Adapun PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Lalu, apa itu kebiri kimia? Secara prinsipnya, kebiri kimia adalah proses penghilangan hormon testosteron dari tubuh manusia. Aktivitas medis ini bukan barang baru, karena tindakan medis ini sudah lama diterapkan di beberapa negara. "Zaman dulu aktivitas kebiri harus dilakukan dengan operasi untuk membuang testis ataupun isi dari testis seseorang. Hal itu dilakukan untuk menghentikan produksi hormon testosteron di testis," tutur pakar urologi RSCM, Dr. Nur Rasyid, kepada GATRA, Sabtu pekan lalu.

Seiring berjalannya waktu, metode kebiri kimia terus mengalami perkembangan. Bahkan pada tahun 1970-an, proses penghentian produksi hormon testosteron dilakukan dengan menggunakan suntikan. Proses inilah yang dikenal sebagai kebiri kimia. "Pakar urologi biasanya sudah sangat hafal prosedur kebiri kimia. Pengalaman Urolog sejak sekolah hingga praktik, kebiri kimia ini sudah menjadi pekerjaan rutin. Jadi bukan suatu hal yang menyeramkan dan sebagainya," ujar Nur.

Untuk melakukannya, kata Nur, digunakan obat bernama Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LH-RH) Agonist. Nantinya, obat ini yang akan menghalangi perintah yang bersumber dari otak kepada testis, untuk membentuk hormon testosteron. "Obat itu disuntikkan lewat otot. Bisa di pantat, lengan, atau bisa di bawah kulit dinding perut. Semua tergantung tipe obatnya," ucap pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tersebut.

Di kalangan urolog, Rasyid melanjutkan, penggunaan obat tadi sebenarnya sudah lumrah. Obat biasanya dimanfaatkan untuk pasien kanker prostat. Pasien yang diberi tindakan ini adalah pasien yang kanker prostatnya sudah menyebar dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan tindakan operasi. "Selama obat itu masih berada dalam tubuhnya, maka testis yang bersangkutan tidak akan membentuk hormon testosteron tadi. Ketika obat itu disetop, maka pelan-pelan akan produksi lagi hormonnya dalam tubuh," Rasyid menjelaskan.

Pada terdakwa pemerkosaan anak, Rasyid melihat hukuman kebiri kimia bertujuan untuk menghilangkan libido seksual pelaku. Ini merupakan efek samping dari pemberian obat LH-RH Agonist. Jika memang

"Selama obat itu masih berada dalam tubuhnya, maka testis yang bersangkutan tidak akan membentuk hormon testosteron tadi. Ketika obat itu disetop, maka pelan-pelan akan produksi lagi hormon tersebut dalam tubuhnya."

Nur Rasyid



GATRA/ EVA KURNIA ALI



tujuannya untuk menghilangkan minat seksual pada pelaku, Nur menganggap secara medis tindakan itu sudah tepat. "Karena dorongan seksual muncul oleh kadar testosteron dalam tubuhnya. Dengan jumlah testosteron yang sangat sedikit, maka libido akan hilang," ujarnya.

Selain turunnya libido, Rasyid mencatat ada beberapa efek samping lain dari pemberian LH-RH Agonist. Efek yang paling sering terjadi mirip seperti menopause pada wanita. Untuk pria, kondisi ini disebut andropause. Selain itu, orang yang diberi LH-RH akan lebih cepat merasa lelah dan mengalami penurunan semangat. "Juga jadi cepat mengantuk," ia menambahkan.

Rasyid mengingatkan tentang dampak berbahaya jika obat tersebut digunakan dalam jangka waktu yang panjang, atau lebih dari dua tahun. Salah satunya bisa menimbulkan pengeroposan pada tulang. "Makanya, pembatasan dua tahun dalam aturan itu sebetulnya kami anggap dalam ilmu urologi masih *fair*. Karena, pun dalam kasus pasien kanker prostat, kita obati dengan waktu dua tahun saja," ujarnya.

Secara prinsip, Rasyid mengaku setuju dengan diberlakukannya hukuman kebiri kimia tersebut. Dirinya berpandangan, aturan tegas harus ditegakkan, mengingat yang menjadi korban nantinya adalah calon-calon penerus masa depan. "Yang harus dibela bukan pelakunya, tapi anak-anak yang bisa menjadi calon korban," ujarnya.

Sejak tahun 1970-an, proses penghentian produksi testosteron dilakukan dengan menggunakan suntikan. Proses inilah yang dikenal sebagai kebiri kimia.

Berseberangan dengan Rasyid, Wakil Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr. Muhammad Nasser, mengatakan bahwa IDI sejak dulu sudah bersikap jelas dan tegas. "IDI tidak menganjurkan anggotanya menjadi eksekutor dalam memberikan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak," ujar Nasser saat dihubungi GATRA, Senin pekan lalu.

Nasser menjelaskan, dokter memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki, mengobati, menyembuhkan, menyempurnakan fungsi-fungsi tubuh, baik fungsi faali maupun organis. "Doktrin untuk membuat organ tubuh rusak, itu tidak ada dalam ilmu kedokteran. Dokter hanya melakukan tindakan yang benar," katanya.

Jika memang eksekusi itu akhirnya akan dilakukan oleh dokter rumah sakit pemerintah, misalnya dokter dari kepolisian atau TNI, kata Nasser, IDI akan tetap mempersilakannya. Namun, Nasser melanjutkan, perlu dicatat bahwa hal itu merupakan perintah atasan semata, dan secara prinsip tetap bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter.

Menurut Nasser, kebiri kimia memang menyangkut kepentingan umum, yakni untuk menyelamatkan anak-anak dari predator seksual. Namun ia meyakini ada cara lain yang bisa ditempuh untuk menghukum para pelaku. Ia memberikan saran agar pemberian hukuman tak sekadar untuk membalas dendam atau memberikan efek jera. Akan tetapi juga untuk memperbaiki bagian yang rusak.

"Kalau jiwanya rusak kita perbaiki. Kalau niatnya tidak baik diperbaiki, makanya ada lembaga pemasyarakatan. Bukan dengan dihukum [kebiri]," Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia ini menerangkan.

Nasser pun memberikan catatannya terkait pemberian hukuman kebiri kimia. Pemberian zat kimia memang dilakukan untuk menetralkan hormon testosteron pelaku sehingga tidak berlebihan seperti sebelumnya.

NEGARA YANG SUDAH MENERAPKAN KEBIRI KIMIA

INGGRIS	Hukuman kebiri kimia diterapkan sejak tahun 1950-an
AMERIKA SERIKAT	Pertama dijatuhkan tahun 1966. Saat ini setidaknya diterapkan di sembilan negara bagian
KOREA SELATAN	Diterapkan sejak tahun 2011. Menjadi negara Asia pertama yang menerapkan kebiri kimia
RUSIA	Hukuman kebiri kimia disahkan sejak 2011. Diiringi ancaman hukuman penjara seumur hidup
INDIA	Diterapkan sejak 2012. Diiringi dengan hukuman kurungan penjara selama 30 tahun

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

"Namun, itu berlaku jika memang benar penyebab pelaku melakukan tindak kekerasan seksual adalah kelebihan hormon. Kalau tidak, dampaknya akan berbeda lagi," ia menjelaskan.

Menurut Nasser, bahan kimia yang disuntikkan atau diserap tubuh itu justru bisa berpotensi merusak fungsi tubuh lain. Juga berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Parahnya lagi, dampak pada tubuh itu baru akan terasa bertahun-tahun kemudian. "Kerusakan ginjal, hati, atau apa pun kita belum tahu karena tergantung dosis dan tubuhnya," ucapnya.

Dalam pandangan Nasser, pemerintah seharusnya melihat bahwa latar belakang orang melakukan kekerasan seksual tak hanya sekadar faktor hormon yang berlebihan. Bisa juga karena latar belakang kepribadian atau kebiasaan pelaku yang cenderung menonton film porno, atau kondisi psikologisnya.

"Itu sangat berpengaruh, tidak semuanya faktor hormon. Mengontrol hormon testosteron itu tidak menyelesaikan masalah kekerasan seksual," tegas dokter yang juga menjabat sebagai Vice President World Association for Medical Law ini. ■

"Doktrin untuk membuat organ tubuh rusak, itu tidak ada dalam ilmu kedokteran. Dokter hanya melakukan tindakan yang benar."

Muhammad Nasser



DOK. GATRA/ RIFKI M. IRSYAD

HIDAYAT ADHININGRAT P., ERLINA FURY SANTIKA, DAN UCHA JULISTIAN MONE



Warga melintas di dekat puing-puing rumah akibat banjir bandang di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

ANTARA FOTO/ BAYU PRATAMA S.

BANJIR

Petaka Usai Hutan Hilang

Kalimatan Selatan alami banjir terbesar dengan dampak terluas dalam sejarah. Eksploitasi hutan dituding sebagai penyebab utama. Pemerintah dituntut mengkaji ulang pemberian izin pembukaan hutan dan pertambangan.

Sudah sepekan berlalu banjir melanda Kalimantan Selatan. Namun, penyebab banjir masih menyisakan tanda tanya. Apalagi kejadian banjir di tengah pandemi ini mungkin yang paling besar dan terluas karena melingkupi 11 kabupaten/Kota di provinsi ini.

Namun fenomena ini bukan hal baru, mengingat banyak perubahan kondisi alam dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, menurut Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Kuncoro, sejak 2006 bencana banjir terus berulang.

Bagi Walhi, banjir besar kali ini bukan hanya lantran faktor tingginya curah hujan. Melainkan juga maraknya izin usaha pertambangan dan besarnya luasan kebun sawit yang berdampak pada terjadinya degradasi lingkungan.

Walhi melaporkan, di Kalimantan Selatan saja terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebanyak 100 di antaranya lubang aktif dan sisanya ditinggalkan tanpa reklamasi.

Kerusakan ekosistem lantas terjadi di daerah hulu yang berfungsi sebagai area tangkapan air, menyebabkan kelebihan air di hilir dan berujung banjir. "Terulang terus. Kasihan rakyat, sudah pandemi dihajar banjir lagi," katanya kepada GATRA.

Padahal, dia melanjutkan, Walhi Kalimantan Selatan berulang kali mengingatkan kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Dengan luas area 3,7 hektare di Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 13 kabupaten/kota, sebanyak 50% di antaranya terbebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit. Ini belum termasuk hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH).

Sementara itu, bagi pemerintah, anomali cuacalah penyebab utama banjir. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) M.R. Karliansyah, banjir di Kalimantan Selatan bukan soal luas hutan yang terdegradasi di kawasan DAS Barito.

Daerah aliran sungai (DAS) Barito di Kalsel yang seluas 1,8 juta hektare merupakan bagian dari keseluruhan DAS Barito Kalimantan yang memiliki luas 6,2 juta hektare, sehingga DAS Barito Kalsel hanya mencakup 39,3% kawasan hutan dan 60,7% areal penggunaan lain (APL) bukan hutan.

Kondisi DAS Barito Kalsel tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan keseluruhan. Jadi sudah jelas, banjir pada DAS Barito Kalsel di Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kirwa, DTA Kurau, dan DTA Barabai karena hujan ekstrem.

***

Berbeda dengan pemerintah, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan) punya analisis tentang penyebab banjir yang diduga karena perubahan area penutup lahan di kawasan. Dalam unggahannya di laman Facebook, Tim Tanggap Darurat Bencana LAPAN memaparkan temuannya tentang penyebab banjir yang terjadi sejak tanggal 12-13 Januari 2021 yang merendam ribuan rumah di Provinsi Kalimantan Selatan.



DOK.PRIBADI

Kisworo Dwi Kuncoro

Hasil analisis curah hujan dengan data satelit Himawari-8, menunjukkan liputan awan penghasil hujan terjadi sejak tanggal 12-13 Januari 2021 dan masih berlangsung hingga 15 Januari 2021. Curah hujan menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada 13 Januari 2021.

Sementara itu, analisis area terdampak banjir menggunakan data satelit Sentinel 1A pada 12 Juli 2020 (sebelum banjir) dan pada 13 Januari 2021 (saat/setelah banjir) menunjukkan ada variasi luas genangan.

Tertinggi, terjadi di Kabupaten Barito Kuala dengan luas sekitar 60.000 hektare, Kabupaten Banjar sekitar 40.000 hektare, Kabupate Tanah Laut sekitar 29.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 12.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar 11.000 hektare, Kabupaten Tapin sekitar 11.000 hektare, dan Kabupaten Tabalong sekitar 10.000 hektare.

Genangan juga meliputi Kabupaten Balangan, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Murung Raya seluas 8.000-10.000 hektare.

Lapan kemudian menganalisis perubahan penutup lahan di DAS Barito menggunakan data mosaik Landsat guna mendeteksi penutup lahan tahun 2010 dan 2020. Setelah melalui pengolahan data digital dengan metode random forest, dalam kurun waktu 10 tahun ada penurunan luas hutan primer, sekunder, sawah, dan semak belukar dengan masing-masing penurunan sebesar 13.000 hektare, 116.000 hektare, 146.000 hektare, dan 47.000 hektare. Sebaliknya, terjadi perluasan area perkebunan secara signifikan sebesar 219.000 hektare.

Kepala Lapan, Thomas Djamaluddin, kepada GATRA menyebut, analisis yang dilakukan Tim Tanggap Darurat Bencana LAPAN mampu memberi gambaran kemungkinan penyebab banjir di DAS Barito. Ia berharap bisa menjadi referensi upaya mitigasi di kemudian hari.

Data analisis Lapan itu serupa dengan data Walhi Kalimantan Selatan, yang mengurai perubahan area lahan hutan. Dari luas hutan 3,7 hek-



FOTO: ACHMAD ARIEF/ANTARA

Alih fungsi hutan di Kalimantan

tare tersebar di 13 kabupaten/kota, 1,2 juta hektare di antaranya telah mendapatkan izin tambang, 620.081 hektare untuk sawit, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (IUPHHK-HT) seluas 567.865,51 hektare.

Selain itu, lahan hutan juga berubah menjadi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHHK-HA) 234.492,77 hektare, hutan primer 89.162 hektare, dan hutan sekunder 581.188 hektare. Pada 2009-2011, luas perkebunan meningkat masif hingga 14% dan terus meningkat hingga 72%.

Tentang detail perusahaan perkebunan yang memegang konsesi lahan itu dan aktivitasnya dalam lima tahun terakhir, Kisworo mengatakan, pihaknya belum mengkaji secara detail. "KIta masih fokus tanggap darurat dulu," ujarnya.

Namun, ia mendesak pemerintah, baik Presiden, gubernur, maupun bupati dan wali kota agar segera turun tangan dan bertindak. Di antaranya, menindaklanjuti temuan tutupan area lahan di daerah aliran sungai, dan membentuk satgas atau komisi khusus kejahatan tambang dan pengadilan lingkungan.

Kemudian, pemerintah perlu segera melakukan *review* dan audit seluruh perizinan dan mencabut izin tambang nakal dan yang belum beroperasi.

***

Soal berkurangnya tutupan lahan di Kalimantan, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Belinda Arunarwati Margono, menyebut, dari sistem pemantauan hutan memang ada pengurangan, namun penurunanya masih terkendali.

Peta tutupan lahan Kalimantan periode 1990-2019 dan hasil analisis tutupan lahan DAS Barito Kalsel menunjukkan penurunan luas hutan alam DAS Barito Kalsel selama 1990-2019 sebesar 62,8% dengan penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 sebesar 55,5%.

Belinda menjelaskan, dirinya menunjukkan peta tutupan lahan tersebut untuk meluruskan informasi yang berkembang liar di media sosial perihal luas tutupan hutan Kalimantan, yang disebut sebagai penyebab utama banjir. Untuk mendapat gambaran holistik, perlu dilakukan kajian keseluruhan DAS di wilayah banjir.

Berdasarkan data Ditjen PKTL KLHK tahun 2019, kondisi hulu DAS Barito 80,8% bertutupan hutan dengan proporsi 79,3% bertutupan hutan alam, dan sisanya 1,4% adalah hutan tanaman. Sedangkan dari 19,3% berpenutupan bukan hutan alam, terdiri dari mayoritas semak belukar dan pertanian campur.

Lebih lanjut, seluas 94,5% dari total wilayah Hulu DAS merupakan kawasan hutan, dengan 83,3% bertutupan hutan alam dan sisanya 1,3% adalah hutan tanaman. Sementara 15,4% berpenutupan bukan hutan alam, yaitu mayoritas semak belukar dan pertanian campur.

DAS Barito di Kalimantan Selatan memiliki proporsi 39,3% kawasan hutan dan 60,7% areal penggunaan lain (APL). Khusus untuk kawasan hutan yakni seluas 718.591 hektare, sebanyak 43,3% arealnya berhutan, dan 56,7% tidak berhutan.

"DAS di sini ini memang didominasi lahan untuk masyarakat atau disebut areal penggunaan lain yang bukan merupakan kawasan kutan," ia menuturkan.

Sementara itu, Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah, saat *briefing* virtual pada pertengahan Januari lalu, menyebut anomali cuaca menjadi pemicu utama banjir. Lima hari sejak 9-13 Januari terjadi peningkatan delapan hingga sembilan kali lipat curah hujan dibandingkan dengan biasanya. Air masuk ke Sungai Barito sebanyak 2,08 miliar meter kubik. Sementara itu, kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta meter kubik.

Daerah banjir berada pada titik pertemuan dua anak sungai yang cekung, dan morfologinya merupakan *meander* serta fisiografinya berupa tekuk lereng (*break of slope*), sehingga terjadi akumulasi air dengan volume besar.

Faktor lainnya, beda tinggi hulu-hilir sangat besar, sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume besar menyebabkan konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran.

"Kami meluruskan agar tidak terjadi simpang siur informasi sekaligus memberi rekomendasi tepat bagi pengambil kebijakan, khususnya mitigasi bencana," ia mengungkapkan.

SANDIKA PRIHATNALA, WAHYU WACHID ANSHORY, UCHA JULISTIAN MONE, DAN RYAN PUSPA BANGSA



PENANGGULANGAN EKSTREMISME

PASAL KARET Penanggulangan Ekstremisme

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme dikhawatirkan memicu konflik horizontal. Terdapat pasal karet yang berpotensi disalahgunakan banyak pihak.

Polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024, berlanjut. Peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari lalu ini masih diragukan banyak pihak.

Padahal, berdasarkan keterangan dari laman Sekretariat Kabinet, munculnya RAN PE didasari oleh semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia—yang telah menciptakan kondisi rawan dan mengancam hak atas rasa aman serta stabilitas keamanan nasional.

"Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan," demikian bunyi penjelasan yang tertuang dalam pertimbangan perpres tersebut.

Lebih jauh, pada Pasal 1 ayat (2) didefinisikan, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan, RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"RAN PE bertujuan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal 2 ayat (2).

Sebagaimana tercantum pada lampiran perpres, RAN PE memuat pendahuluan dan strategi RAN PE Tahun 2020-2024, di mana strategi RAN PE juga dilengkapi dengan Aksi PE. Disebutkan dalam Perpres, RAN PE Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan, RAN PE mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi



ANTARA FOTO/RIVAN AMBACO ADMAJA

Pasukan Brimob Mabes Polri melakukan penyergapan saat simulasi penanganan ancaman bom dan serangan terorisme

ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Polhukam, Sukamta, mempertanyakan motif Presiden Jokowi melahirkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021. "Sudah ada UU Terorisme yang dipergunakan untuk memberantas teroris. Apakah perpres ini benar-benar menyasar pencegahan tindakan terorisme, atau punya motif lain?" ucapnya.

Selain itu, Sukamta menilai Perpres ini rawan multitafsir mengenai makna ekstremisme. Menurutnya, apa yang tertuang dalam perpres itu menjadi tidak jelas. "Pemerintah tidak jelas arah dan tujuannya menerbitkan perpres tersebut," katanya.

Tafsir ekstremisme versi pemerintah tersebut, kata Sukamta, berbahaya bagi keadilan hukum dan iklim demokrasi. Tidak jelas bentuk dan ukurannya, sehingga dalam tataran teknis menjadi multitafsir. "Misal, ada laporan dari masyarakat tentang kejadian ekstremisme kepada kepolisian terhadap orang atau kelompok dengan keyakinan tertentu yang dianggap mendukung ekstremisme kekerasan polisi pun akan menafsirkan laporan secara subjektif," ia mengungkapkan.

Sebenarnya, Sukamta menambahkan, jika pemerintah serius mau memberantas terorisme, maka pergunakan Undang-Undang Terorisme. Selama ini UU Terorisme hanya dipergunakan untuk mengadili pelaku teroris dengan baju agama Islam. "Sedangkan kelompok pemberontak, makar di Papua tak pernah ditangani layaknya kasus terorisme. Namun, hanya ditangani seperti kelompok kriminal bersenjata biasa," Sukamta memaparkan lebih lanjut.

Pengamat terorisme Ridwan Habib menyebut, definisi ekstremisme dalam Perpres ini tidak dijelaskan secara rinci. Bahkan, menurutnya, ekstremisme dalam perpres yang didefinisikan menggunakan kekerasan mengarah pada terorisme juga malah bertentangan dengan teori dasar kontraterorisme. "Karena teroris itu teorinya mereka selalu berusaha menyamar sebagai orang baik-baik di masyarakat. Artinya, kalau seorang teroris itu tidak mungkin di masyarakat ia menunjukkan kekerasan, sebelum melakukan serangan ya," katanya kepada GATRA, Senin lalu.

Kerap kali, Ridwan melanjutkan, dalam pemberitaan mengenai penangkapan teroris, pelaku memiliki keseharian sebagai seseorang yang dianggap baik di lingkungannya. Lantas, bagaimana caranya masyarakat bisa mengetahui seseorang merupakan ekstremis jika dalam kesehariannya tidak menunjukkan tanda-tanda sama sekali? Maka dari itu, terminologi ekstremisme perlu didetailkan.



Sukamta

HUMAS FRAKSI PKS DPR RI

Selain itu, Ridwan juga menyayangkan, penyusunan Perpres ini tidak melibatkan organisasi-organisasi masyarakat besar seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. Padahal, pelibatan itu sangat penting untuk menghindari adanya pertentangan di masyarakat akibat Perpres ini. "Orang akan tuding satu sama lain. Ini ekstremis, yang itu tidak ekstremis. Itu harus melibatkan ormas-ormas besar, dipanggil untuk duduk bersama dalam sekretariat bersama, membahas dan merincikan hal itu," ujarnya.

Meski saat ini Perpres RAN PE masih belum bisa dimanfaatkan untuk melaporkan seseorang, lantaran sekretariat bersama (sekber)-nya belum terbentuk, menurur Ridwan Habib, tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan konflik di masyarakat. Karena itu, sekber harus bisa mengakomodasi berbagai macam karakter masyarakat agar tidak terjadi permasalahan baru nantinya. "Makanya pada saat aplikasinya, di praktik sekretariat bersama itu, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) harus mengundang ormas-ormas. Jadi sekber ini menurut saya harus melibatkan masyarakat," dia menjelaskan.

Lagi pula, nantinya sekber juga akan merumuskan langkah-langkah apa saja yang akan diambil. Misalnya, menyiapkan ulama moderat untuk memberikan ceramah soal nasionalisme, kebangsaan, NKRI ke masjid-masjid. Jika tidak melibatkan ormas-ormas besar, ulama-ulama moderat yang ditugaskan ini bisa ditolak masyarakat.

Secara tertulis, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardhani, mengatakan bahwa dalam RAN PE sudah secara limitatif diatur ekstremisme seperti apa yang dimaksud. Beberapa parameter yang dipergunakan, antara lain, keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem serta bertujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Kemudian, persoalan RAN PE memberikan berbagai ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya menganggulangi ekstremisme dan terorisme, di antaranya melalui: pembentukan platform kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan di masyarakat. Lalu, pelibatan para pemimpin komunitas dalam melakukan pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tatanan masyarakat. "Hingga optimalisasi program pemolisian masyarakat," katanya.



Jaleswari Pramodhawardhani

KPG/DO

> "Perpres ini justru memperkuat pencegahan dari hulunya terhadap tindak pidana terorisme, karena hilirnya sudah dapat ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum."
>
> Eddy Hartono

***

Deputi Penegakan Hukum BNPT, Eddy Hartono, menjelaskan ada beberapa faktor kunci yang dapat diidentifikasi sebagai latar belakang tumbuh dan berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Yaitu, besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan, kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, perlakuan yang tidak adil, dan intoleransi dalam kehidupan beragama.

Eddy memandang seluruh langkah sudah dikalkulasikan dengan terukur oleh BNPT dalam penyusunan perpres ini. Misalnya dalam pasal pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme, implementasinya akan menitikberatkan pada kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Eddy mengaku tidak khawatir regulasi ini akan disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Menurutnya, pakem Perpres Nomor 7 Tahun 2021 itu sebagai payung hukum sudah sangat kuat mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme secara sistematis, terencana, dan terpadu.

Apalagi, hal tersebut diperkuat adanya Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antarkementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme. "Perpres ini justru memperkuat pencegahan dari hulunya terhadap tindak pidana terorisme, karena hilirnya sudah dapat ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum," ia memaparkan.

Dengan adanya perpres tersebut, menurut Eddy, peran BNPT dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme akan semakin kuat. "Sesuai amanat Pasal 43G Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," ujarnya. ■

GANDHI ACHMAD, M. GURUH NUARY, UCHA JULISTIAN MONE, RYAN PUSPA BANGSA, DAN ERLINA FURY SANTIKA

ATLETIK

Menunggu Gebrakan LBP di Dunia Atletik

Luhut Binsar Pandjaitan resmi menjabat Ketum PB PASI periode 2021-2025. Dipilih secara aklamasi, menepikan sejumlah nama beken di panggung nasional. Bisakah PASI berjaya?



Kongres PB PASI 2021 yang berlangsung secara virtual dengan agenda pemilihan Ketua Umum

GATRA/EVA ADRIANA AU

Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) resmi memimpin Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) periode 2021-2025. Pemilihan berjalan mulus bagi Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi ini. Ia didapuk menjadi Ketua Umum melalui proses aklamasi dalam kongres yang berlangsung secara virtual, Senin lalu.

Pria kelahiran Simargala, Tapanuli, Sumatera Utara, 28 September 1947, ini mendapat dukungan penuh dari 34 pengurus provinsi PB PASI dan satu pengurus Persatuan Atletik Master Indonesia (PAMI). Kepemimpinan Luhut ini melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan PB PASI menggantikan almarhum Mohamad "Bob" Hasan yang telah memimpin PB PASI selama 41 tahun—sejak 1979.

Sekretaris Jenderal PB PASI, Tigor Tanjung, menyebut antusiasme pengurus daerah tinggi, sejak awal disodorkan nama Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua umum. "Nama [Luhut] kita sosialisasikan ke daerah, dan daerah spontan setuju. Bahkan mereka inisiatif bikin surat pernyataan dukungan. Daerah melihat Pak Luhut memenuhi banyak kriteria," kata Tigor kepada GATRA, Jumat pekan lalu.

Masuknya purnawirawan Jenderal TNI bintang empat ini dalam bursa calon Ketum PB PASI, awalnya mengejutkan banyak pihak. Namanya baru dimunculkan seminggu sebelum kongres dimulai. Menurut sumber GATRA, pada rapat pengurus terbatas November 2020 silam, sosok Luhut belum beredar dan tidak ada dalam pendekatan.

Gerilya awal dari pengurus PASI Jaya untuk menjaring calon sebenarnya dimulai dengan pendekatan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir. Juga ada nama Menparekraf, Sandiaga Uno. Namun keduanya belum bersedia untuk maju. "Sandiaga sebenarnya mau, tapi baru menjabat menjadi menteri. Jadi momennya kurang tepat, karena dia mau fokus genjot kinerja 100 hari dulu," kata seorang sumber GATRA.

Dalam proses pendekatan dan penjaringan calon, dia melanjutkan, ada cerita menarik. Yakni ketika Erick Thohir mundur dari proses kandidasi dan berupaya mendorong Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk maju. Erick khabarnya, telah mengutus Raja Sapta Oktohari untuk membantu tim PASI Jaya berkonsolidasi dengan Puan. Sampai akhirnya, Puan pun mengutus Utut Adianto untuk melakukan penjajakan. "Puan sebenarnya bersedia, hampir 100%. Tinggal mencari waktu untuk melakukan pertemuan dengan pengurus PB PASI. Bahkan Utut sudah kontak Pak Tigor," sumber GATRA itu menjelaskan.

Di lain pihak, pengurus PASI Banten malah sudah mengunci nama Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, untuk maju menjadi calon Ketum PB PASI. Nama Dudung dimunculkan lantaran dinilai memiliki ikatan saudara dengan istri almarhum Bob Hasan, Pertiwi Hasan. "Dari pengprov (pengurus provinsi) sebenarnya masih ada yang ingin PB PASI dipimpin oleh keluarga Bob Hasan juga," dia menambahkan.

> "PASI harus berupaya memenuhi harapan masyarakat agar atlet-atlet atletik Indonesia mampu menempati posisi terhormat di tingkat regional dan internasional."
>
> Luhut Binsar Pandjaitan

Singkat cerita, ada dua nama yang kencang disuarakan untuk dibawa ke Kongres PASI: Puan Maharani dan Mayjen Dudung. Di luar dugaan, saat pengurus PB PASI menggelar rapat penyelenggaraan kongres, Selasa pekan lalu, nama LBP-lah yang diusung. Bahkan usai rapat keluar surat yang intinya nama yang dicalonkan hanya Luhut.

Untuk sosialisasi akhirnya, pengurus pusat menggelar rapat de-

ngan pengprov, Rabu pekan lalu. Mendengar nama Luhut inilah membuat banyak pengprov lainnya akhirnya "sepakat" —karena sebenarnya masih ada yang berharap dengan calon lain. Apalagi sudah beredar surat kesediaan Luhut menjadi Ketum PB PASI dengan kop kementerian.

Ketua PASI DI Yogyakarta, Teguh Rahardjo, menceritakan sekitar sepekan sebelum kongres sebenarnya sejumlah pengurus provinsi PASI juga sudah membahas calon ketua umum secara informal. "Saya memunculkan (nama calon) tokoh-tokoh yang dekat dengan pemerintah, seperti Sandiaga Uno, Erick [Thohir], Luhut, bahkan Prabowo [Subianto], Puan [Maharani], dan Menteri PUPR (Basuki Hadimulyono)," Teguh memaparkan.

Pengurus lain, kata Teguh, umumnya sepakat. Bahkan, pada rapat informal tersebut Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, dimunculkan. Dan memang, sebelum usulan dalam rapat informal tersebut, "teman-teman Jakarta" sudah menjajaki lebih dahulu beberapa tokoh yang ada. Namun akhirnya nama-nama calon yang beredar saat itu ditepikan karena yang dimunculkan pusat hanya calon tunggal dengan nama LBP.

Teguh mengakui, sebenarnya dirinya kurang sreg dengan calon tunggal. Namun, aturan PASI tak mengatur proses pemilihan ketua umum secara detail, seperti proses penjaringan dan larangan calon tunggal. "AD ART tidak ada ketentuan yang mengatur (calon tunggal) itu," katanya.

Ia juga membeberkan, tak semua pengurus daerah sepakat dengan calon tunggal. "Tapi memang tidak ada pilihan. *Positive thinking* saja Pak Luhut punya kapasitas, komitmen, dan visi untuk PASI seperti disampaikan saat kongres 25 Januari," katanya.

Hal itu bisa terlihat dari proses surat dukungan dari pengprov yang tidak langsung semuanya bulat. Sumber GATRA menuturkan, awal yang mendukung calon tunggal LBP itu dari 11 pengprov. Jumat pekan lalu bertambah menjadi 14 suara dan Sabtu pekan lalu menjadi 31 surat dukungan. Hingga akhirnya pada ahad lalu, baru genap 34 surat dukungan setelah PASI Banten, Kalimantan Timur, dan Papua Barat akhirnya mendukung.



GATRA/EVA AGRIANA ALI

Tigor Tanjung

Tigor Tanjung enggan menjelaskan persoalan proses pendekatan nama-nama calon Ketua Umum PB PASI. Namun ia mengatakan, pencarian ketua umum bukan perkara ringan. Menurut PB PASI, pada pencarian sosok ketum, tantangannya bukan hanya untuk "mendekati", melainkan juga didekati oleh sosok yang ingin menjadi ketua umum.

Hanya saja, PB PASI juga memprioritaskan pada pendekatan kepada orang-orang tertentu yang dianggap layak dengan melihat status pekerjaannya dan pandangannya terhadap olahraga atletik. "Sejumlah nama, baik dalam pendekatan maupun masukan, telah ditindak lanjuti dengan menunjukan perkembangan yang berbeda-beda. Di antara pihak yang didekati, Pak Luhut yang menyatakan kesediaannya secara lisan kepada Sekretaris Umum PB PASI dan juga mengirimkan pernyataan tertulis," ucap Tigor saat berbicara dalam Kongres PASI.

***

Luhut Binsar Pandjaitan, yang pernah memimpin Federasi Olahraga Karate-DO Indonesia (FORKI) dua periode (2001-2009), diharapkan bisa membawa angin segar bagi kemajuan atletik nasional.

Pengalaman Luhut dalam memimpin juga menjadi hal yang membuat kecondongan PB PASI mendekati sosok berusia 73 tahun tersebut. Dua periode memimpin FORKI, kemudian kenyang pengalaman di lembaga pemerintahan, dan memiliki akses luas menjadi nilai utama yang dinilai akan bermanfaat bagi PB PASI ke depan. "Pak Luhut juga memiliki karakteristik Pak Hasan. Seperti kedisiplinan beliau, kemauan keras supaya segala rencana bisa terwujud. Kedua hal ada memiliki kesamaan. Karakter mereka sama," cerita Tigor.

Ia pun percaya, Luhut mampu melanjutkan warisan Bob Hasan yang telah membina secara apik olahraga atletik nasional. Tigor pun mengakui sosok Luhut juga akan membawa perubahan di PB PASI. Karena menurutnya, penyesuaian kebijakan di poros pimpinan pastinya akan berubah.

Tigor mencontohkan, jika di era Bob Hasan banyak kegiatan PASI yang disentralisasikan di pusat, maka kemungkinan ke depan, melihat karakter Luhut yang punya pola teritorial layaknya eks tentara, pengembangan akan dialihkan fokus ke daerah. Hal itu, juga demi memenuhi harapan pengurus daerah agar lebih diperhatikan dalam menangani hambatan pengembangan atletik di daerah selama ini.

"Kalau pada era Bob Hasan beliau banyak kegiatan yang dibawa ke sentral, sekarang menurut saya akan berubah di mana kita harus menyesuaikan ke daerah. Kalau semua di pusatkan, maka beban pusat juga akan sangat besar. Daerah juga harus bergiat dan membangun, baik sarana, SDM, dan organisasi juga harus diperbaiki itu nanti yang dalam waktu ke depan akan dilakukan," Tigor menambahkan.

LBP dalam sambutannya saat kongres menyebut olahraga atletik sebagai nomor partisipan olahraga tertinggi dunia, harus terus dikelola dengan baik agar menjadi pembantu pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidangnya. "PASI harus berupaya memenuhi harapan masyarakat agar atlet-atlet atletik Indonesia mampu menempati posisi terhormat di tingkat regional dan internasional," ucapnya.

***

Atlet PB PASI Fauma Depril Jumara berharap, kepemimpnan Luhut dapat meneruskan cita-cita Bob Hasan. Menurutnya, Bob memiliki keinginan agar cabang olahraga (cabor) atletik tidak dipandang sebelah mata ketimbang cabor lain. "Bob ingin agar atlet-atlet PASI lolos Olimpiade, tapi bukan *wild card*," ujarnya kepada GATRA, Senin lalu.

Selama ini, banyak para atlet di PASI bisa mengikuti Olimpiade karena undangan. Baru-baru ini, sprinter Lalu Muhammad Zohri mampu menembus tiket Olimpiade Tokyo mendatang. Fauma melanjutkan, Bob selalu mendorong agar atlet-atlet PASI tidak berpikir untuk menjadi pemenang di PON atau SEA Games semata, melainkan juga Olimpiade.



DOK. PRIBADI

Fauma Depril Jumara

Selain urusan prestasi, Luhut juga diminta agar menerapkan aturan khusus untuk Stadion Madya di Gelora Bung Karno. Selama ini, para atlet kerap terganggu ketika latihan di sana. Fauma mengungkapkan, stadion tersebut dibuka untuk siapa saja dan kapan saja, termasuk ketika para atlet profesional tengah berlatih. "Stadion itu khusus atletik, tapi ada yang masuk terus main sepak bola," kata Fauma.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengucapkan selamat dan terima kasih karena jenderal bintang empat itu mau berkontribusi untuk atletik Indonesia. "Tentu saya mengucapkan selamat dan terima kasih, karena Pak Luhut mau menjadi pimpinan cabor. Karena kita tahu untuk memimpin cabor ini juga bukan hal yang mudah, apalagi sedang di masa pandemi, untuk mendorong prestasi apalagi ini atletik, artinya butuh pengabdian luar biasa," ujar Amali kepada GATRA.

Amali yakin, LBP mampu melakukan tugasnya dalam memimpin PB PASI. "Atletik ini kan Olympic Number dan kita sangat merindukan prestasi-prestasi di bidang atletik ini, baik untuk kejuaraan-kejuaraan tingkat dunia, baik itu olympic dan di berbagai lomba lain dengan berbagai nomor kejuaraan," ucapnya.

Amali juga berharap, seluruh pemangku kepentingan di atletik dapat memberikan dukungan kepada LBP agar bisa memimpin dan atletik bisa berprestasi ke depannya. "Ke depan, kata Amali, karena sama-sama berada di Kabinet Indonesia Maju, menurutnya, komunikasi akan semakin lancar," Amali mengungkapkan. ■

GANDHI ACHMAD, M. GURUH NUARY, UCHA JULISTIAN MONE, M. ALMER SIDQI, DAN ARIF KOES HERNAWAN (YOGYAKARTA)

LUHUT BINSAR PANDJAITAN:
Ketua Umum PB PASI

PASI Harus Terus Dikelola dengan Baik



GATRA/ZIKRI HAKIMATO

Terpilihnya Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi Ketua Umum PB PASI periode 2021-2025 menjadi catatan sejarah bagi cabor atletik. Ia pun mengaku senang terpilih karena dirinya secara tidak langsung juga memiliki interest dalam bidang olahraga atletik.

Apalagi, di masa pagebluk Covid-19 ini, Luhut juga akan mendorong dan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik para atlet, pengurus, dan pelatih untuk membangun *teamwork* yang kuat agar bisa bersinergi satu sama lain.

Sinergi ini sangat penting, menurut Luhut, karena dampak pandemi ini merupakan tantangan terbesar untuk atletik dan olahraga lainnya. Saat kompetisi tingkat nasional, regional, maupun internasional mengenai penundaan bahkan pembatalan. Usai kongres virtual pada Senin lalu, Luhut pun bersedia diwawancarai oleh wartawan Gatra Wahyu Wachid Anshory. Berikut petikannya:

Bagaimana ceritanya pada akhirnya Anda bersedia maju?

Saya sebenarnya ini tiap hari *treadmill* itu aja setiap hari saya rata-rata 50 sampai 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit kalau hari Sabtu Minggu. Saya *treadmill* pasti *nonton* YouTube. Bertahun-tahun ini hobi saya lihat atletik dan berenang. Karena saya dulu perenang. Saya lihat itu agak sedikit hafal bagaimana berlatih itu segala macam. Jadi begitu ada *nyari-nyari* ketua ini, saya pikir, saya tanya Pak Tigor. Terus Pak Tigor sampaikan ada. Pak Tigor juga *nawarin*, kemudian teman-teman bantu, ya sudah saya ikut.

Apa pertimbangan terbesar Anda dalam meyakinkan semua pemilik suara bahwa Anda layak memimpin?

Jadi saya ini yang kedua kali mengemban tugas semacam ini dulu saya dua periode menangani sebagai Ketua Umum FORKI. Sekarang saya menangani ini. Saya sadar akan posisi strategis olahraga atletik sebagai *mother of all sports* dan *number one olympic sport*. Ditambah lagi partisipan tertinggi dunia, maka saya berpendapat PASI harus terus dikelola dengan baik agar menjadi membantu pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidangnya. PASI harus berupaya memenuhi harapan masyarakat agar atlet-atlet atletik Indonesia mampu menempati posisi terhormat di tingkat regional dan internasional.

Apakah Anda ingin meneruskan cita-cita Bob Hasan?

Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya ucapan terima kasih kepada almarhum Bapak Mohamad Hasan yang layak jadi bapak atletik Indonesia melalui jasa dan pengabdiannya selama puluhan tahun menjadi Ketua Umum PB PASI. Beliau telah meletakkan fondasi, tiang-tiang, bahkan semua bangunan atlet Indonesia yang kokoh yang kita harus pelihara bersama.

Saya akan berusaha melanjutkan perjuangan dan cita-cita almarhum agar PASI berkembang terus dan menghasilkan atlet yang membanggakan dengan prestasi tingkat dunia. Terus terang, nanti pelajari semua dan saya tahu Pak Bob orangnya *passion* banget. Saya kira, kita bisa terusin apa yang terlihat bagus kenapa tidak, kenapa mesti membongkar-bongkar kalau memang sudah bagus. Kita juga akan meneruskan capaian-capaian yang sudah dilakukan Pak Bob Hasan, saya kira, beliau *legend* dalam pembinaan atletik. Kita menghormati beliau.

Apa visi dan misi Anda untuk PASI?

Kita nanti akan fokus kepada apa namanya beberapa cabang dari 48 nomor atletik ini. Nanti kita akan melihat mana sih yang kita kira-kira bisa juara. Kedua, kita menotifikasi daerah-daerah mana sebenarnya yang melahirkan atlet-atlet dalam bidang tertentu yang spesifik misalnya NTT dan NTB. Tim sedang inventarisasi.

Ketiga, betul-betul melihat dengan *science*. Kita akan bekerja sama dengan beberapa negara yang kita anggap *leading* di regional ini. Untuk berapa nomor kita berpikir untuk mengirimkan pelatih-pelatih terbaik kita ke sana. Dengan begitu, kita harap penyiapan tim atletik kita, dalam beberapa belas atau puluh dari 48 nomor itu, akan betul-betul berangkat dan mencapai target pencapaian prestasi.

Apa program prioritas Anda dalam waktu dekat ini?

Tentu, paling penting pengurus ini. Saya sudah bicara dengan Pak Zacky dan Pak Tigor. Kita ingin itu selesai rampung dalam dua minggu ke depan paling lama. Setelah itu rampung, kita langsung membuat agenda dan *time table* dalam beberapa bidang. Tapi satu yang menjadi agenda kita mau perbaiki adalah sekolah olahraga.

Saya sangat percaya kepada masalah ilmu matematik utamanya. Tadi saya sudah *engage* Profesor Surya Johanes, yang selalu membimbing dalam bidang Olimpiade. Kebetulan dia jadi staf khusus saya. Dia yang nanti dengan tim menyusun kurikulum khusus menyangkut masalah dari matematika hingga fisika.

Dengan demikian, anak-anak ini, ketika selesai bertanding, punya masa depan yang baik. Saya lihat bagaimana di Tiongkok, sistemnya di Amerika. Dan di kita, kelihatannya masalah pendidikan kurang. Kita akan melakukan perbaikan di sini.

Pak Zacky dan Pak Tigor mengingatkan saya, pengurus nanti harus ada regenerasi yang lebih muda. Biarlah mereka nanti lebih banyak berperan, teknik ke bawah mereka punya keinginan untuk bikin maju rata-rata berumur 20 sampai 30-an. Mereka-mereka ini saya pikir akan banyak berperan mengilmiahkan atletik, sehingga kita harap bisa lebih baik lagi ke depan.

Bagaimana dengan target?

Kalau soal target, terlalu dini saya *ngomong* karena saya belum lihat semua. Tapi yang penting, saya konsolidasi beberapa bulan ini, karena Covid-19 jadi *handicap* juga untuk konsolidasi.

PASI ini juga membutuhkan dana besar untuk kegiatannya. Apakah Anda siap?

Kan sudah saya bilang dua kali, memang PB FORKI enggak *nombokin*. Soal *nombok-nombokin* kita lihatlah sambil jalan. Kalau soal itu nanti segala macam kita sambil jalan, kita lihat nanti. Saya sudah bincang-bincang sama Pak Zacky dan Pak Tigor maupun dengan tim. Tentu adalah nanti langkah-langkah yang kita lakukan untuk itu. ■

AKTIVISME LIRIK

Perlawanan Lewat Lirik Lagu

Aktivisme lewat lirik lagu kerap hadir pada tiap pembabakan zaman. Dengan sifatnya yang universal, musik kerap digunakan sebagai medium perlawanan. Hampir tiap rezim, termasuk rezim Joko Widodo, pernah merasakan pedasnya kritikan lewat lirik lagu.



GATRA/ ARDI WIDI YANSAH

Grup band Efek Rumah Kaca

"Jika bumi adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya/Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik/Ada tak ada manusia mestinya pohon-pohon itu tetap tumbuh/Ada tak ada manusia mestinya terumbu karang itu tetap utuh."

Bait-bait lirik di atas dikutip dari lagu "Bebal" ciptaan Bagus Dwi Danto, musisi *folk* kelahiran Semarang, yang tergabung dalam proyek bernama Sisir Tanah. Karya-karya Danto lahir dari ragam kegelisahannya melihat ketidakadilan, utamanya yang kerap menimpa masyarakat agraris. Di Yogyakarta, misalnya, Danto menjadi saksi perubahan zaman, tak lain karena maraknya pembangunan gedung, hotel, dan bandara yang mengusur lahan produktif warga.

"Ada persoalan-persoalan yang mendorong aku untuk menulis lalu dijadikan lagu. Itu seperti catatan-catatan hidup yang aku alami, kemudian sepertinya kok *relate* dengan orang lain," kata Danto kepada GATRA pada Senin, 4 Januari lalu.

Sisir Tanah merilis album perdananya *Wob*, pada 2017. Sejak itu, nama Sisir Tanah mulai dikenal publik secara luas. Tembang-tembang Danto menjadi jargon perlawanan, baik terhadap penggusuran lahan pertanian, konflik agraria, maupun perusakan lingkungan hidup.

Tak jarang Danto sowan dan terjun ke lapangan untuk melihat situasi secara langsung. Selama turun lapangan, dia berhubungan dengan para warga dan turut serta dalam aksi solidaritas. Hal ini pun mampu menginspirasinya. "Aku merasa terharu jika berkunjung ke suatu tempat. Bahkan terkadang mereka tidak tahu aku yang mana, tetapi sudah pernah mendengar laguku," ujarnya.

Dia juga pernah ikut serta dalam aksi petani di Rembang, Kulon Progo, Gunung Talang, Pekanbaru, Samarinda, dan Maros. "Perjuangan warga mendatangkan inspirasi. Mereka berjuang dengan jalannya, dan aku dengan caraku sebagai seniman. Aku sangat ingin terhubung dengan subjek yang aku tulis," ujarnya.

Meski mengusung konsep musik *folk*, yang mengalun dan terdengar ramah di telinga, Danto berhasil menciptakan lirik-lirik yang kuat dan seruan untuk melawan ketidakbenaran. Pada karya berjudul "Lagu Hidup", seruan itu terdengar keras dan menantang:

"Dan harus berani/Harus berani/Jika orang-orang serakah datang/Harus dihadang/Harus berani/Harus berani/Jika orang-orang itu menyakiti/Harus bersatu menghadapi."

Musik, pada akhirnya, menjadi medium yang dipilih Danto untuk melakukan aktivisme terhadap berbagai bentuk penindasan. Namun, kata dia, musik secara khusus dan seni secara umum bukanlah satu-satunya medium. Dia menilai, setiap orang memiliki caranya sendiri untuk melakukan aktivisme. Bahkan jika hal itu menyangkut warga biasa, yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya.

"Di keseharian, peran-peran itu bisa terus dilakukan. Justru praktik keseharian itu yang lebih penting daripada kita punya karya yang omong banyak hal, tetapi praktik kesehariannya bertolak belakang dengan apa yang kita buat," tuturnya.

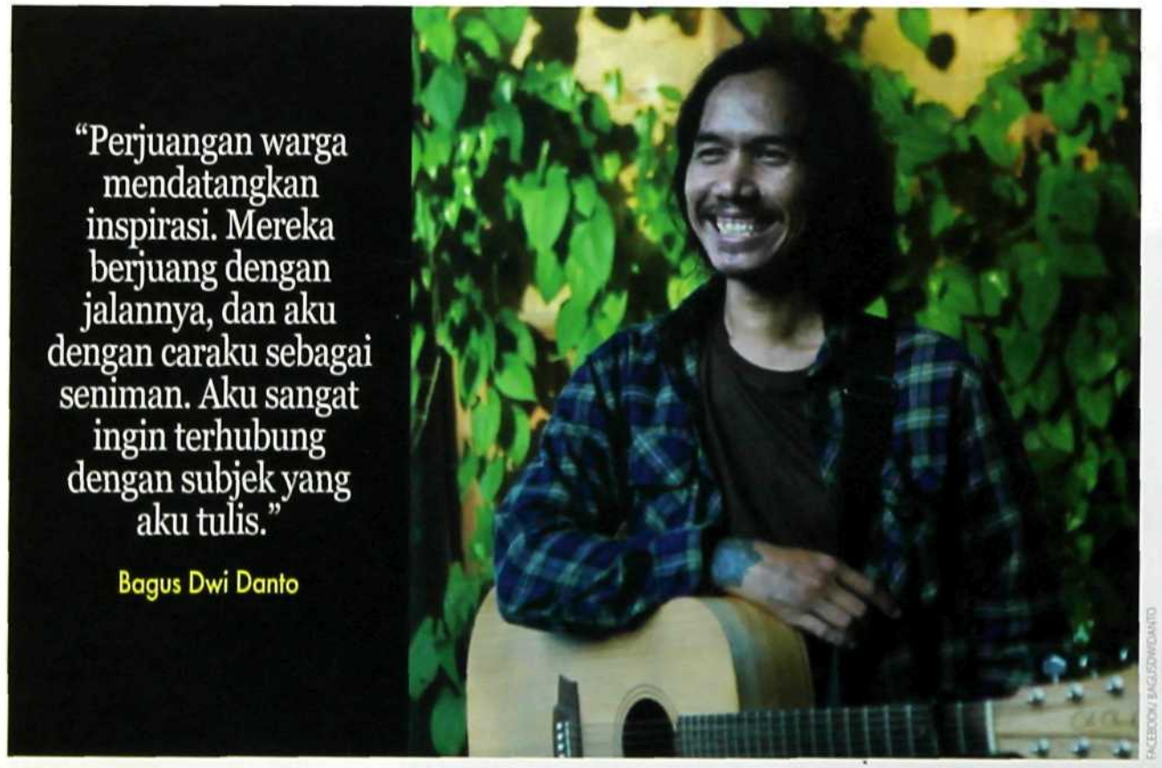
Saat ini, Danto melanjutkan, banyak musisi yang mulai turut aktif untuk mengolah materi terkait aktivisme, dan terlibat langsung ke dalam aksi secara personal. Keterlibatan musisi menjadi nilai positif dalam membangun kesadaran publik, apa lagi jika mengenai isu-isu sosial, politik, dan lingkungan.

Sisir Tanah, misalnya, turut menyumbang tembang dalam dua album kompilasi bertajuk *Senandung Energi Bumi* dan *Dunia Milik Kita*. Dua album tersebut berisi kumpulan lagu yang dihimpun dari para musisi dan band seperti Mr. Sonjaya, Iksan Skuter, Oscar Lolang, Navicula, Frau, dan Cholil Mahmud, dengan satu tema yang sama: lingkungan.

Bagi Danto, menjadi langkah strategis jika semakin banyak orang yang membuat lagu dalam usaha untuk membangun kesadaran dan mendorong perubahan. Dengan keberadaan banyak musisi di sebuah isu, itu akan secara tidak langsung menggeret para penggemarnya untuk hadir dan turut berkontribusi. Bagaimanapun, Danto percaya bahwa para penggemar biasanya akan ikut meneladani tentang apa yang disuarakan idolanya.

"Kalau aku menyanyi di depan teman-teman aktivis, itu seperti menggarami air laut. Tetapi kalau kita bikin sesuatu yang menghadirkan orang umum dan publik yang minim informasi soal itu, maka dampaknya akan sangat luas," ucapnya.

Berbicara mengenai musik dan aktivisme pada dua dekade terakhir, tidak akan bisa dilepaskan dari



FACEBOOK/BAGUSDWIDANTO

grup band Efek Rumah Kaca (ERK). Beranggotakan Cholil Mahmud, Poppie Airil, dan Akbar Bagus Sudibyo, band yang dibentuk sejak tahun 2001 itu secara konsisten memotret gejolak sosial dan politik melalui karya-karya mereka.

Album pertama mereka, *Efek Rumah Kaca* (2007), misalnya, memuat satu tembang berjudul "Di Udara", yang secara khusus didedikasikan untuk aktivis Munir Said Thalib yang dibunuh. Frasa "di udara" merupakan metafora terbunuhnya Munir di dalam sebuah perjalanan pesawat terbang. Lagu tersebut juga menyuarakan bagaimana perjuangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia tidak akan pernah usai.

Para personel ERK mengatakan, aktivisme adalah keniscayaan dan merupakan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara. Menurut mereka, partisipasi tersebut harus berjalan seiring waktu. "Bukan lima tahunan seperti pemilu. Aktivisme adalah keniscayaan demokrasi karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata mereka melalui wawancara tertulis kepada GATRA pada Rabu, 6 Januari lalu.

Topik yang diangkat ERK juga beragam dan tidak melulu mendaratkan kritik kepada para penguasa. Pada lagu "Belanja Terus Sampai Mati", ERK dengan sinis menggambarkan bagaimana sikap konsumtif manusia yang dirongrong zaman. Contoh lain, sarkasme tajam terhadap kapitalisme muncul di lagu "Cinta Melulu". Pada lagu ini, ERK menggambarkan bagaimana para musisi yang terjebak ke dalam tuntutan pasar, dan dengan tuntutan tersebut menciptakan lagu-lagu patah hati yang tak habis-habis.

"Segala keresahan yang kami alami, mulai pengalaman pribadi, keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan hidup, sosial-politik, dan sebagainya. Sejauh ini kami percaya, mengutarakan sesuatu pendapat melalui musik masih relevan dan layak dilanjutkan," ujarnya.

***

Musik sebagai medium aktivisme, bukan hanya muncul pada era kini.

Aktivisme lirik lagu telah dilakukan di masa-masa silam, pada tiap babak sejarah. Sebagai salah satu bentuk seni, musik memiliki kelebihan tersendiri. Dia mudah digunakan untuk menyampaikan pesan dan bersifat universal.

Pengamat musik lulusan ISI, Aris Setyawan, mengatakan bahwa musik *jazz* yang lahir dan berkembang di Amerika Serikat merupakan salah satu bentuk musik yang lazim digunakan sebagai medium aktivisme. Azis beranggapan, musik *jazz* sarat dengan unsur politis warga kulit hitam di Amerika, yang kerap diperkusi karena diskriminasi rasial dan juga terpinggirkan secara politik.

Lebih jauh, sebuah jurnal dari Universitas Santa Clara, "Leaders and Players: The Role of Jazz Artists as Civil Rights Activists" (2019), menyebut bahwa banyak pemimpin gerakan sosial kulit hitam di era 1960 hingga 1970-an yang merupakan pemain musik *jazz*. Di tahun-tahun tersebut terdapat gejolak pergerakan budaya yang masif di AS, dan menjadi kurun waktu terpenting antara hubungan musik dan politik.

Sementara itu, di Indonesia, kata Aris, musik dangdut pada mulanya merupakan salah satu genre yang turut menawarkan perubahan sosial. Bahkan, menurut Aris, dangdut merupakan sebuah musik yang sangat subversif di awal kemunculannya. "Ketika dipopulerkan oleh Rhoma Irama, di era 70-an, dangdut menjadi sarana aktivisme yang berupaya menyampaikan suatu gagasan sosial kepada para pendengarnya," ujar Aris kepada GATRA pada Minggu, 3 Januari lalu.

Di penghujung abad ke-20, beberapa tahun sebelum rezim Soeharto tumbang, nama Pas Band masuk ke dalam catatan Aris sebagai sosok terpenting aktivisme melalui musik. Album pertama mereka, *Four Through The Sap* (1993), dianggap mampu mengelabui sensor rezim pada produksi-produksi musik, yang pada waktu itu dilancarkan penguasa Orde Baru agar segala hal bisa diatur sesuai dengan keinginan rezim.

"Pas Band mengakali sensor dengan menggunakan lirik berbahasa Inggris. Hanya ada empat lagu di album itu, satu berbahasa Indonesia, dan tiga berbahasa Inggris," ujarnya.



DOK. PRIBADI

Aris Setyawan

Setelah itu, gerakan dari para musisi yang lain bermunculan. Meski demikian, Aris percaya bahwa musik tidak serta-merta bisa mengubah kondisi secara langsung. Musik hanyalah sebuah medium pembantu. Pasca reformasi, ketika lagu "Di Udara"--yang didedikasikan untuk aktivis Munir Said Thalib--garapan grup band Efek Rumah Kaca meledak, para pembunuh Munir yang sesungguhnya masih menjadi misteri hingga saat ini.

"Itu cukup menjadi media dan membantu meningkatkan kesadaran orang. Musik menjadi reportase dalam bentuk seni yang menyampaikan suatu pesan, tetapi belum tentu bisa mengubah kondisi juga, bahkan harus dibarengi dengan aksi nyata," tuturnya.

Aktivisme, Aris melanjutkan, akan selalu ada dalam berbagai bentuk. Musik yang beraktivisme, dengan kata lain, bukan berarti harus bergenre atau berlabel musik keras, seperti punk, rock, atau metal. Nama-nama seperti band Marjinal, Sex Pistols, atau Rage Against The Machine, kata Aris, bukan suatu bentuk eksklusif musisi yang mendorong perubahan sosial. Karena sifatnya yang universal, genre atau bentuk musik apa pun pada dasarnya dapat menyampaikan pesan tertentu.

Musik dan aktivisme, pada gilirannya, akan selalu hadir dan berkelindan untuk mengagendakan perubahan. Menurut Aris, setiap kali ada sesuatu yang represif, pasti bakal lahir sesuatu yang subversif. Pada tahun-tahun belakangan, musik dan aktivisme masih terus menggaung. Musisi-musisi baru yang membawa pesan-pesan perubahan terus bermunculan di tiap zaman.

"Kalau tidak ada Orde Baru, mungkin kita tidak akan pernah mengenal band-band yang sangat politis dan kritis. Dan ketika ada satu musuh bersama, kita merasa ada sesuatu yang harus dihajar. Sekarang pun juga sama kondisinya," kata Aris.

Setidaknya, ada beberapa gerakan besar yang terjadi selama satu tahun terakhir, yang merespons kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo, seperti revisi UU KPK dan pengesahan *omnibus law*. Pada gilirannya, aksi-aksi massa direpresi dan penangkapan aktivis terjadi secara masif.

"Fajar Merah, misalnya, bukankah lagu-lagu dia yang diambil dari puisi bapaknya masih sangat relevan sekarang? Aku pikir, premis bahwa setiap kali ada represi, maka pasti ada yang subversi, pasti masih sangat relevan untuk musik dan aktivisme saat ini," Aris memungkasi. ■

M. ALMER SIDQI

PERLAWANAN MUSISI

CHRISSIE HYNDE
Personel The Pretenders
Ditangkap 2003
Protes Penyembelihan Hewan

TOM MORELLO
Gitaris Rage Against The Machine (RATM)
Ditangkap 2006
Protes soal upah layak di AS

PAUL SIMONON
Personel The Clash
Ditangkap 2011
Mendekati Kilang Minyak Dengan Kapal Greenpeace

JOAN BAEZ
Ditangkap 1967
Protes Perang Vietnam

PUSSY RIOT
Terakhir ditangkap pada 2018
Memprotes Vladimir Putin pada Piala Dunia

MEHDI RAJABIAN
Ditangkap 10 Agustus 2020
Rezim Iran menganggap pro prostitusi



KOES BERSAUDARA
Dipenjara tahun 1965
Dianggap membawa budaya Barat ke Indonesia

BIMBO
Dicekal Rezim Orde Baru
Dianggap menyindir istri pejabat dengan lagu "Tante Sun"

IWAN FALS
Dua minggu diinterogasi pada era Orde Baru pada April 1984. Tahun 1980-an, konsernya terus menerus disabotase pemerintah

SLANK
Digugat DPR tahun 2008
karena mendukung KPK

SUPERMAN IS DEAD
Melawan Reklamasi Teluk Bali pada tahun 2016

ANANDA BADUDU
Personel Banda Neira
Ditangkap 2019
Dituduh mendanai aksi demonstrasi menolak UU KPK

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

MARCHELLA FP & DIKSI
RASA SAYANG

BANYAK orang kesulitan memilih kata-kata untuk mengungkapkan rasa sayang kepada pasangan atau orang terdekat. Kesulitan memilih diksi ini terjadi pada lintas generasi.

Demikian hasil riset penulis buku *Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini* atau NKCTHI, Marchella Febrisia Putri (FP), yang disampaikan dalam konferensi pers virtual tentang ungkapan hati yang diikuti Iwan Sutiawan dari GATRA pada Selasa kemarin.

Perempuan yang akrab disapa Cecel ini, mengungkapkan bahwa kesulitan memilih kata-kata atau diksi ini karena tidak terbiasa menyampaikan ungkapan sayang kepada pasangan. Selain itu, faktor budaya Timur turut memiliki andil.

"Itu yang aku lihat saat aku riset kemarin. Banyak dari teman-teman kita, sebenarnya tahu suka atau peduli, tetapi enggak tahu *gimana* bentuknya, dan itu peran aku di sana menerjemahkan rasa-rasa itu menjakadi kata-kata," ujarnya.

Bukan hanya dua hal di atas, tidak sedikit orang mengira bahwa pasangannya mengerti tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan. "Kayak, ya *udah aja* nanti juga dia paham, nanti juga dia tahu. Banyak hal yang ditunda-tunda yang akhirnya berbahaya. Nantinya kayak tumpukan yang bisa meledaknya menjadi hal-hal yang buruk," tuturnya.

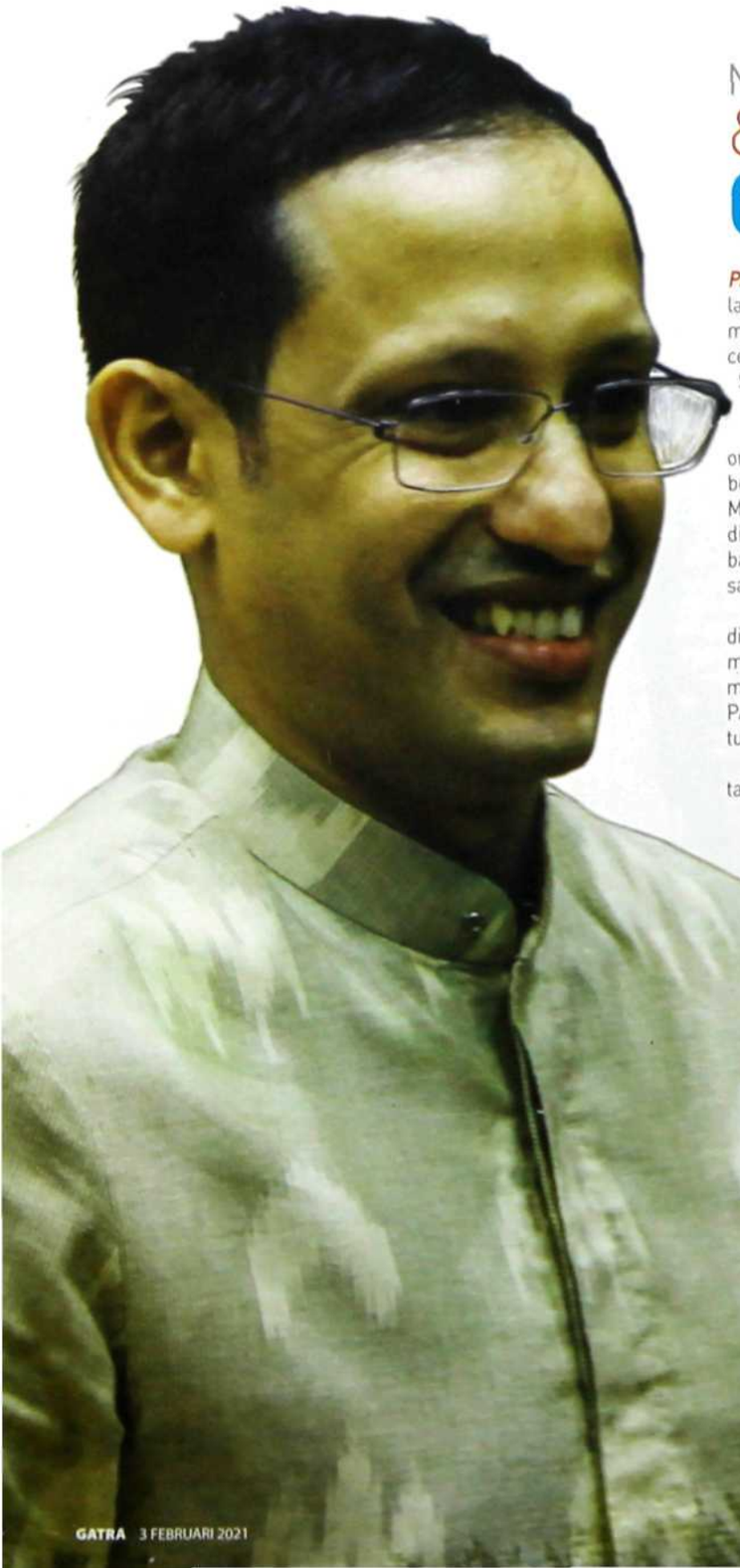
Mengungkapkan rasa sayang itu sangat penting. Ini hal kecil yang menjadi bagian untuk menghangatkan hubungan yang kian lama kadang kadarnya menurun. "Mungkin tahun pertama masih sayang-sayangnya, tahun kedua mulai kering," ucapnya berseloroh.

Adapun agar ungkapan sayang tidak menjadi gombal atau menggelikan, Cecel memberikan tips, gunakan bahasa ibu atau keseharian yang paling nyaman dan bisa dipahami pasangan.

"Mungkin bisa diubah bahasa-bahasanya, seperti yang aku *sampain* di NKCTHI, "Terima kasih sudah lahir ke bumi", "Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini". Hal-hal yang memang relevan," katanya. ■



INSTAGRAM.COM/MARCHELLAFP



ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA

NADIEM MAKARIM & SENSASI
GURU PAUD

PANDEMI Covid-19 yang tak kunjung mereda sejak delapan bulan terakhir, memaksa sebagian besar aktivitas manusia harus dilakukan di rumah. Hal ini demi mencegah penularan virus SARS-CoV-2 agar tak kian meluas. Salah satu aktivitas yang harus dilakoni di rumah, yaitu proses belajar siswa.

Aktivitas belajar di rumah mau tak mau memaksa orang tua aktif mendamping si buah hati mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Tak terkecuali seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, yang belakangan merasakan bagaimana sensasi dan tantangan dalam mendampingi sang buah hati menimba ilmu.

Memiliki anak di tahap tumbuh kembang dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), memaksa Nadiem belajar menjadi seorang guru PAUD. Mantan bos Gojek tersebut mengaku makin giat belajar tentang cara menjadi guru PAUD untuk sang buah hati. Ia belajar melalui video tutorial dan membaca buku.

"Saya Menteri Pendidikan, tapi saya kan enggak tahu cara menjadi guru PAUD. Jadi, saya belajar lewat video dan baca buku," kata pria yang akrab disapa Mas Menteri ini kepada Ucha Julistian Mone dari GATRA, baru-baru ini.

Nadiem berpandangan bahwa partisipasi orang tua menjadi *game changer* dalam pembelajaran anak. Menurutnya, yang menjadikan pendidikan melalui pembelajaran secara daring atau pendidikan jarak jauh itu efektif atau tidak, ujung-ujungnya juga terdapat peranan orang tua.

"Apakah orang tua mau dan punya kemampuan untuk hadir di pembelajaran anaknya, untuk memotivasi anaknya, untuk membantu dia dengan pekerjaannya. Jadinya, untuk pertama kalinya kita menyadari sebagai orang tua bahwa jangan lupa *loh* kita, saya, dan para orang tua itu adalah pendidik utama anak kita," tutur Nadiem. ■

GATRApedia

Go to www.GATRApedia.com
untuk Mendapatkan
Berbagai Produk
dari GATRA MEDIA GROUP



Unduh Aplikasi **GatraPedia** untuk mendapatkan **Majalah Gatra, Gatra Review, buku-buku** dan berbagai **artikel yang ada Anda perlukan.** Kami juga dapat menyediakan berbagai jasa **pembuatan buku, majalah internal, buletin, kalender serta berbagai produk percetakan dengan pengalaman yang tinggi.**

Unduh Aplikasi GATRA
di Smartphone Anda

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

@Gatramediagroup @gatracomID @gatra_news